

Memodelkan Indeks Pembangunan Manusia
di Provinsi Lampung
Skripsi



Disusun dalam rangka menulis skripsi

Oleh :

Nama : Jodi Juliano
Nomor Mahasiswa : 12313295
Jurusan : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
YOGYAKARTA
2016**

Memodelkan Indeks Pembangunan Manusia
di Provinsi Lampung

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir
guna memperoleh gelar Sarjana jenjang strata 1



Jurusan Ilmu Ekonomi
Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Jodi Juliano

Nomor Mahasiswa : 12313295

Jurusan : Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

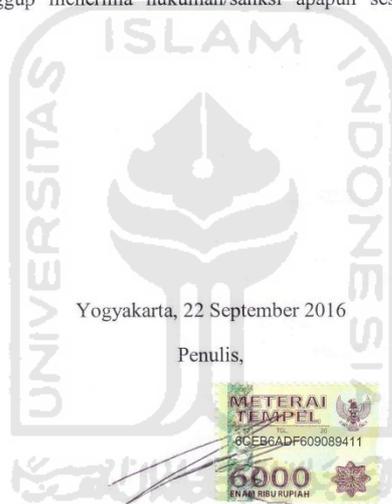
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain seperti dimaksud dalam buku pedoman penyusunan skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi FE UII. Apabila dikemuda hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka Saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 22 September 2016

Penulis,



Jodi Juliano

PENGESAHAN

Memodelkan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung

Nama : Jodi Juliano

Nomor Mahasiswa : 12313295

Jurusan : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, 15 September 2016

Telah di setujui dan di sahkan oleh

Dosen pembimbing,

Heri Sudarsono, SE.,MEc

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

MEMODELKAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI

LAMPUNG

Disusun Oleh : **JODI JULIANO**

Nomor Mahasiswa : **12313295**

Telah di pertahankan di depan Tim Penguji dan Dinyatakan **LULUS**

Pada hari Jumat, tanggal: 21 Oktober 2016

Penguji /Pembimbing Skripsi : Héri Sudarsono, SE., MEc

Penguji : Abdul Hakim, SE, M.Ec., Ph.D.

: Sahabudin Sidiq,Dr., SE.,MA.



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Dr. D. Agus Harjito, M.Si.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucap puji syukur kepada ALLAH SWT atas rahmatNya skripsi ini dapat diselesaikan

Karya ini merupakan salah satu bentuk Bakti

Kepada keluargaku tercinta

Teruntuk Papa, Mama, Baba, Didi, Nto

Terimakasih atas segala cinta, kasih sayang, kesabaran, dukungan, kepercayaan dan doatulus yang selalu dipanjatkan kepadaku

Karya ini kupersembahkan juga kepada Kawan-kawan Seperjuanganku

Dulur-dulurku di Partai Tambak Boyo, Teman Teman Ilmu Ekonomi 2012

Bung dan Sarinah GmnI Komisariat Hukum VII

Terima Kasih atas Segala bentuk Dukungannya

Dan tentunya karya kecil ini merupakan salah satu bentuk dharma baktiku

Untuk provinsi Lampung Tercinta

Padamu Bhaktiku, bagimu Lampungku, untukmu Indonesiaku

HALAMAN MOTTO

*Hidup manusia, menurutku, haruslah mengakar pada tanah kelahirannya,
dimana dia akan di limpahi kasih sayang yang lembut dari para kerabatnya.*

*Kasih sayang yang akan diberikan oleh wajah sang bumi,
untuk para pekerja yang berlalu lalang di hamparannya,
untuk suara-suara maupun logat-logat bahasa yang dikenalnya,
untuk ciri khas yang begitu akrab pada rumah asal – usulnya,
di tengah hadirnya wawasan wawasan baru.*

Menurutku,

*cara terbaik untuk belajar astronomi adalah
dengan membayangkan langit malam diatas sana sebagai gugusan bintang
bintang kecil yang bertumbuh dari pekarangan rumah kita sendiri.*

(Anak – Anak Revolusi)

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala karunia rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada Allah SWT dan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, dan karena syafaatnya kita dapat hijrah dari zaman kegelapan menuju zaman yang diridhoi oleh Allah SWT.

Penyusunan skripsi ini adalah sebagai tugas akhir yang merupakan syarat untuk meraih gelar Sarjana Strata S-1 pada Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia. Dalam penyusunan laporan penelitian ini, penulis menyadari masih banyak terdapat kelemahan dan kekurangan, sehingga segala bentuk kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan penulis demi kesempurnaan laporan penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi diri penulis dan pihak – pihak terkait lainnya.

Dalam penulisan penelitian ini penulis tidak lupa pula mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayahNya serta kesehatan yang telah dilimpahkanNya kepada penulis selama menulis sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.
2. Orang tua tercinta, Almarhum Ayahanda Sudirman Edy Sepulau raya dan Ibunda tercinta Sriyanti Ginting yang tiada pernah hentinya mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya serta doa yang selalu dipanjatkan dan kepercayaan kepada penulis.
3. Kakak ku tersayang, Aldino Pratama dan Amira Shanaz, semangat, keyakinan dan motivasi yang selalu diberikan kepada penulis. Yang selalu memberikan kepercayaan kepada adiknya. Terimakasih, ba !
4. Adik ku tersayang, Muhammad Sendy Maulana dan Muhammad Audito Almina, terima kasih doa dan motivasi yang selalu diberikan kepada penulis.
5. Keluarga ku tersayang, Eyang Cupi, Tete Irna, Uni Adri, Delon, Bima dan serta Om dan Tante Gintingku. Terima Kasih atas doa dan dukungan yang di berikan kepada penulis
6. Heri Sudarsono S.E . , M. Ec selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini, terimakasih telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Ilmu – ilmu yang bapak berikan kepada penulis selama menempuh jenjang Strata 1 juga dijadikan penulis sebagai bekal untuk kedepannya.
7. Partai Tambak boyo, *Dulur - Dulur* ku Alfin Hasibuan, Ferry Firmansyah, Alwis Zulkarnaen, Zulfikar Sarwo Aji, Maharditya Rozan, Happy Kurniawan, Darojat, Ahmad Riza, Sirojul, Sahrial Affandi, Gustiana Wijaya.

Terima kasih atas segala dorongan moral serta moril yang di berikan kepada penulis selama ini. *See you on the top!*

8. Teman – teman IE 2012 tidak dapat disebutkan satu persatu, senang kenal kalian semua, senang menjadi bagian dari keluarga IE 2012 kalian sudah mengajarkan apa itu kepedulian kepada sesama dan apa itu keluarga dengan kondisi kita yang sama – sama jadi anak perantau. Akan selalu ingat dengan yel – yel kebanggan kita IE SATU, IE KELUARGA, IE SATU KELUARGA
9. Bung dan Sarinah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GmnI) komisariat Hukum Universitas Islam Indonesia, terima kasih atas segala romantika, dialektika dan dinamika selama ini yang sangat membantu penulis. Merdeka!
10. Saudara - saudara Entrepreneur Community, Farid Singgih, Widi Kusyana, Rifky Firdaus, Rio Aprio, Billy Ghazali dll. Terima Kasih atas segala dukungan kepada Penulis selama ini.
11. Kepada Teman – Teman Basis Lampung regional Jogja, Arlingga Mahesa, Rendy Abuy, Imam Bayu, Faidzin Khadafi, Wibi, Angga Karyo, Pablo Vivaldi, Putra Dito, Dea Sella Sabrina Dan Kanda Ibnoe Nugraha. Terima Kasih atas bantuan secara sadar maupun tidak sadar kepada penulis.
12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih banyak.

Wassalamualaikum. Wr.Wb

Yogyakarta, 14 September 2016

Jodi Juliano

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman Judul	ii
Halaman Bebas Plagiarisme.....	iii
Halaman Pengesahan Skripsi.....	iv
Halaman Pengesahan Ujian.....	v
Halaman Persembahan	vi
Halaman Motto.....	vii
Halaman Kata Pengantar	viii
Halaman Daftar Isi.....	xi
Halaman Daftar Tabel	xvi
Halaman Daftar Lampiran.....	xvii
Halaman Abstrak.....	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	13
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14

1.4. Sistematika Penulisan	15
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	18
2.1. Kajian Pustaka	18
2.2. Landasan Teori.....	21
2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia.....	21
2.2.2. Pengangguran	22
2.2.2.1. Hubungan Pengangguran Terhadap Indeks Pembangunan Manusia	28
2.2.3. Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan.....	29
2.2.3.1. Hubungan Antara Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan.....	30
2.2.4. Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan.....	30
2.2.4.1. Hubungan Antara Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Terhadap IPM	31
2.2.5. Tingkat kemiskinan	32
2.2.5.1. Hubungan Antara Tingkat kemiskinan terhadap IPM.....	33
2.3. Kerangka Pemikiran	34
2.4. Hipotesis	35
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	36
3.1. Jenis dan Pengumpulan Data	36
3.2. Definisi Operasional Variabel.....	36
3.3. Metode Analisis	39
3.3.1. Uji T.....	40
3.3.2. Uji F.....	40
3.3.3. Uji R ²	41
3.3.4. Uji Asumsi Klasik	42

3.3.4.1 Uji Multikolinieritas	42
3.3.4.2 Uji Heteroskedastisitas	43
3.3.4.3 Uji AutoKorelasi.....	43
BAB 4 HASIL DAN ANALISIS	45
4.1. Deskripsi Data Penelitian.....	45
4.2. Pemilihan Model Regresi	46
4.2.1. Uji MWD	46
4.3. Uji Asumsi Klasik	50
4.3.1 Uji Heterokedastisitas.....	50
4.3.2 Uji Multikolinearitas.....	51
4.3.3. Uji Autokorelasi	51
4.4. Uji Statistik.....	52
4.4.1. Koefisien Determinasi R-Squared(R^2)	52
4.4.2. Uji F Statistik.....	53
4.4.3. Uji T Statistik.....	54
4.5. Interpretasi Data dan Analisis Ekonomi	57
4.5.1. Interpretasi Data.....	57
4.5.2. Analisis Ekonomi.....	59
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	62
5.1. Kesimpulan	62
5.2. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tingkat Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Sumatera.....	3
Tabel 1.2 Angka Harapan Hidup dan Angka Melek Huruf di Provinsi Lampung tahun 2003-2012.....	4
Tabel 1.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Lampung dari Tahun 1995-2012.....	5
Tabel 1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Lampung	8
Tabel 1.5 Tingkat Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan tahun 1999-2014 di Provinsi Lampung.....	12
Tabel 4.1 Hasil Estimasi Uji MWD untuk Model Linier.....	49
Tabel 4.2 Hasil Estimasi Uji MWD untuk Model <i>Log</i> Linier.....	50
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinieritas dengan Uji Korelasi.....	52
Tabel 4.4 Hasil Uji T	55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
I. Tabel 4.1 Hasil Estimasi Uji MWD untuk Model Linier.....	49
II. Tabel 4.2 Hasil Estimasi Uji MWD untuk Model <i>Log</i> Linier.....	50
III. Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinieritas dengan Uji Korelasi.....	52
IV. Tabel 4.4 Hasil Uji T	55



ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
DI PROVINSI LAMPUNG
PADA TAHUN 1999 - 2014

ABSTRAKSI

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu cara untuk mengukur keberhasilan atau kinerja suatu negara atau wilayah dalam bidang pembangunan manusia. Dengan wilayah yang sangat strategis sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera Provinsi Lampung seharusnya menjadi contoh berkembangnya Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Sumatera Akan tetapi, tingkat Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung sampai saat ini masih tergolong terendah se-Sumatera bahkan dibawah rata-rata angka IPM di Indonesia.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan peran distribusi anggaran dapat mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia. Penelitian ini mengungkapkan hasil dari studi yang menganalisis tentang faktor faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia periode 1999-2014 dengan variabel yang digunakan adalah Penganggaran terbuka, Realisasi anggaran sektor kesehatan, Realisasi anggaran sektor Pendidikan dan Kemiskinan. Pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa Penganggaran Terbuka tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, variabel Realisasi anggaran sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, variabel UMR Realisasi anggaran sektor Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, dan variabel Kemiskinan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Kata Kunci: Indeks Pembangunan Manusia, Penganggaran terbuka, Realisasi anggaran sektor kesehatan, Realisasi anggaran sektor Pendidikan dan Kemiskinan

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan proses struktural dalam menyeimbangkan ekonomi yang terdapat dalam suatu masyarakat sehingga membawa kemajuan dalam arti peningkatan taraf hidup atau penyempurnaan mutu kehidupan dalam masyarakat yang bersangkutan. Pada hakekatnya pembangunan adalah proses perubahan yang berjalan secara terus menerus untuk mencapai suatu kondisi kehidupan yang serba lebih baik, secara material maupun spiritual, pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan struktural sosial, sikap-sikap masyarakat, serta intitusi-intitusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan dalam pendapatan dan pengetasan kemiskinan (Todaro, 2006).

Posisi manusia selalu menjadi tema sentral dalam setiap program pencapaian pembangunan. Dalam skala internasional dikenal tujuan pembangunan milenium (Millenium Development Goals/MDG's), yang disepakati oleh pemimpin dunia dalam KTT 2000. MDG merupakan komitmen masyarakat internasional, khususnya negara yang sedang berkembang, terhadap visi pembangunan. Visi ini secara kuat menempatkan pembangunan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan. Secara nasional beberapa tahun belakangan ini banyak program atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengangkat kondisi sosial dan ekonomi. Kebijakan ini sesuai dengan rekomendasi United

Nations Development Programme (UNDP) dalam buku "The Economics of Democracy: Financing Human Development in Indonesia" (BPS,2007) dengan menekankan perlunya aspek pembiayaan yang lebih memadai bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Secara eksplisit UNDP menyarankan bahwa Indonesia perlu memberikan prioritas investasi yang lebih tinggi pada upaya pembangunan manusia dan cara pembiayaan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu cara untuk mengukur keberhasilan atau kinerja suatu negara atau wilayah dalam bidang pembangunan manusia. IPM merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar yang dilihat dari kualitas fisik dan non fisik penduduk. Adapun 3 indikator tersebut yaitu: indikator kesehatan, tingkat pendidikan, dan indikator ekonomi. Kualitas fisik tercermin dari angka harapan hidup, sedangkan kualitas non fisik tercermin dari lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf, dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi yaitu pengeluaran riil per kapita.

Menurut Human Development Report 2007-2008, IPM Indonesia naik sebesar 0,728 pada tahun 2007 dan berada pada peringkat 107 dari 177 negara yang disurvei oleh United Nation Development Programme, UNDP. Secara umum Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia selama periode 2007-2011 selalu mengalami peningkatan. Hal ini tidak terlepas dari kinerja pemerintah yang terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Situasi perekonomian negara ini yang setiap tahunnya mengalami perubahan semakin membaik secara langsung berdampak pada Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia.

Hal itupun provinsi-provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Dan bisa dilihat di Tabel 1. dibawah ini mengenai Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Sumatera.

Tabel 1.1
Tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2007–2011 di
Provinsi – Provinsi Pulau Sumatera

Nama Provinsi	2007	2008	2009	2010	2011
Aceh	70,59	71,17	71,76	72,27	72,77
Sumatera Utara	72,78	73,29	73,8	74,19	74,65
Sumatera Barat	72,23	72,96	73,44	73,78	74,28
Riau	74,63	75,09	75,6	76,07	76,53
Jambi	71,46	71,99	72,45	72,74	73,3
Kepulauan Riau	73,68	74,18	74,54	75,07	75,78
Bangka Belitung	71,62	72,19	72,55	72,86	73,37
Bengkulu	71,57	72,14	72,55	72,92	73,4
Sumatera Selatan	71,4	72,05	72,61	72,95	73,42
Lampung	69,78	70,3	70,93	71,42	72,45
Indonesia	70,59	71,17	71,76	72,27	72,77

Sumber: BPS Pusat Indonesia, tahun 2013

Berdasarkan tabel 1 diatas bahwa Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Sumatera setiap tahunnya dari tahun 2007-2011 selalu mengalami peningkatan. Dilihat dari data diatas bahwa Provinsi Riau mempunyai nilai Indeks Pembangunan Manusia yang paling tinggi diantara provinsi-provinsi lainnya di Pulau Sumatera. Secara umum nilai rata-rata Indeks Pembangunan Manusia yang terdapat di sepuluh provinsi Pulau Sumatera angkanya diatas nilai IPM Indonesia yang dihitung secara keseluruhan di setiap provinsi di seluruh Indonesia. Hal ini pantas bila provinsi-provinsi Pulau Sumatera menjadi barometer bagi laju pengembangan pembangunan dan perekonomian di Indonesia setelah provinsi-provinsi yang terdapat di Pulau Jawa.

Provinsi Lampung merupakan wilayah yang terletak di ujung selatan Pulau Sumatera dan paling dekat dari Pulau Jawa yang mungkin bisa menjadi poros atau gerbang pembuka perekonomian se-Sumatera. Dengan wilayah yang sangat strategis Provinsi Lampung seharusnya menjadi contoh berkembangnya Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Sumatera. Akan tetapi, tingkat Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung sampai saat ini masih tergolong terendah se-Sumatera bahkan dibawah rata-rata angka IPM di Indonesia, hal ini dapat kita lihat dari data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Lampung tahun 2007-2012 di tabel 1. Hal tersebut mencerminkan ada yang kurang baik dari perkembangan pembangunan manusia, kemajuan perekonomian dan sistem pemerintahan yang menyebabkan tidak berkembangnya Provinsi Lampung dibandingkan dengan provinsi lainya di Pulau Sumatera

Tabel 1.2

Angka Harapan Hidup dan Angka Melek Huruf di Provinsi Lampung tahun 2003-2012

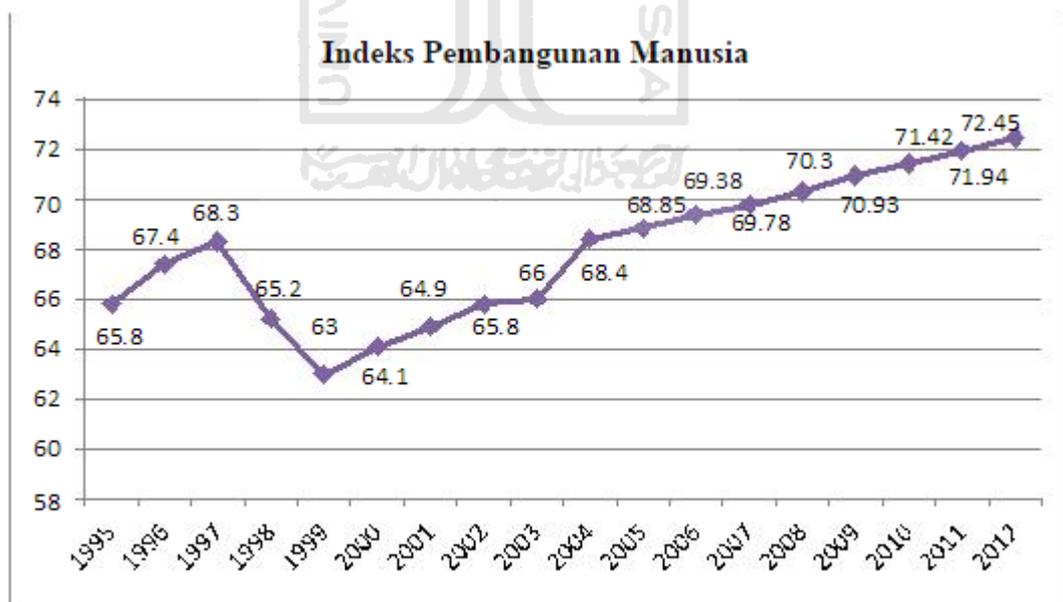
Tahun	Angka Harapan Hidup (tahun)	Angka Melek Huruf (persen)
2003	66,2	91,6
2004	67,6	93,1
2005	68	93,5
2006	68,5	93,5
2007	68,8	93,47
2008	69	93,63
2009	69,25	94,37
2010	69,5	94,64
2011	69,75	95,02
2012	70,05	95,65

Sumber: BPS Provinsi Lampung, tahun 2013

Berdasarkan hasil tabel 2 diatas bahwa angka harapan hidup dan angka melek huruf di Provinsi Lampung dari tahun 2003-2012 dalam hal ini selalu mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Dilihat dari data tersebut bahwa sebenarnya kedua indikator tersebut menunjukkan hal yang baik untuk peningkatan nilai dari indeks pembangunan di Provinsi Lampung. Hal tersebut bahwa tidak ada masalah yang berarti dalam perkembangan indeks pembangunan manusia di Provinsi Lampung walaupun dilihat dari angka indeks pembangunan manusia sedikit tertinggal dengan provinsi-provinsi di Pulau Sumatera lainnya.

Berikut ini disajikan data lebih lengkap tentang laju pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Lampung dari Tahun 1995-2012:

Tabel 1.3



Sumber: BPS Provinsi Lampung, tahun 2013

Tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 1995-2012 di Provinsi Lampung

Berdasarkan gambar 1 bisa kita lihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung dari tahun 1995-2012 terjadi pergerakan yang fluktuatif, terutama tahun disaat sebelum dan sesudah krisis moneter. Namun pada tahun 1999-2012 tingkat dari Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung terus mengalami peningkatan. Walaupun peningkatannya tidak terlalu signifikan tetapi hal ini sangat membantu dalam segi pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung.

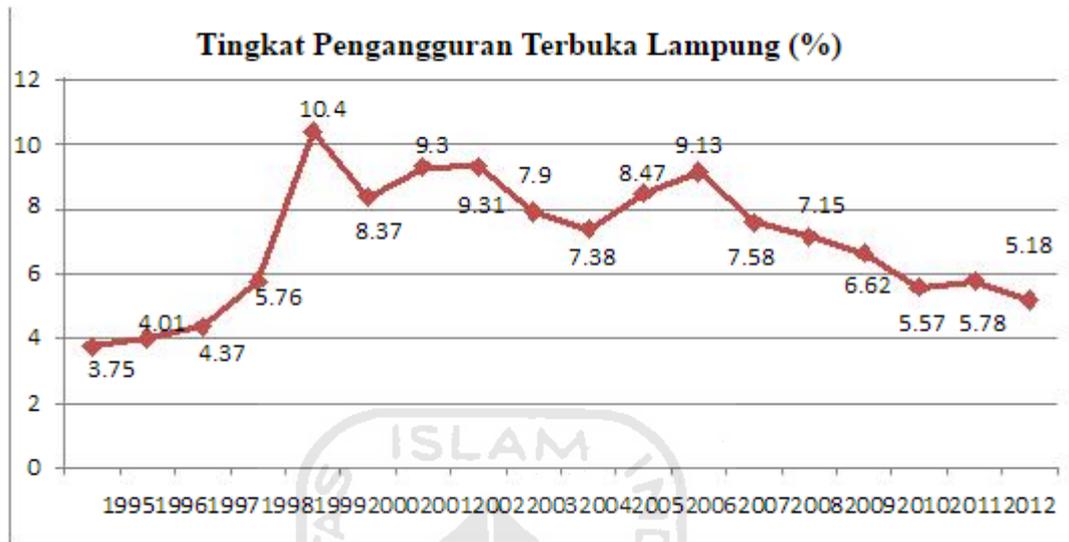
Pada tahun 2002 IPM Lampung yaitu 65,80 angka tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Lampung dalam aspek Indeks Pembangunan Manusia masih digolongkan dalam kelompok menengah kebawah. Dalam skala internasional, status Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung angkanya tergolong dalam kelompok menengah ke atas ($66 < IPM < 80$), sehingga masih diperlukan komitmen dan kerja keras yang kuat dari pemerintah provinsi, dalam meningkatkan kapasitas dasar penduduk yang berdampak pada kualitas hidup.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia salah satunya pengangguran, dimana pembangunan sektor ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya pembangunan sumber daya manusia. Menurut Sukirno (2004), efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran dan kesejahteraan yang telah dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena pengangguran tentunya akan meningkatkan peluang terjebak

dalam kepada rendahnya indeks pembangunan manusia karena tidak dapat memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan untuk kebutuhannya.

Apabila pengangguran disuatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan prospek meningkatkan indeks pembangunan manusia dalam jangka menengah sampai jangka panjang. Jika tingkat pengangguran di suatu daerah tinggi maka akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi. Pendapatan masyarakat berkurang sehingga daya beli masyarakat menurun, pendidikan dan kesehatan yang merupakan kebutuhan dasar untuk meningkatkan kualitas manusia juga tidak dapat tercukupi. Mereka juga tidak dapat menikmati kehidupan yang layak pula, sehingga kesejahteraan mereka tidak terpenuhi. Bahwa pengangguran juga berkaitan erat dengan kualitas pembangunan manusia. Jumlah pengangguran yang tinggi akan mengakibatkan kemakmuran kehidupan masyarakat berkurang. Pengangguran juga mengakibatkan pendapatan mereka berkurang. Pengangguran yang rendah merupakan faktor dalam peningkatan pembangunan manusia.

Tabel 1.4



Sumber: BPS Provinsi Lampung, tahun 2013 (diolah)

Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 1995-2012 di Provinsi Lampung

Berdasarkan hasil gambar 2.2 diatas dapat kita lihat bahwa tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Lampung pada tahun 1995-2012 mengalami gejala yang fluktuatif, dimana persentase pertumbuhan tingkat penganggurannya terjadi naik turun. Terutama tingkat Pengangguran Terbuka mengalami peningkatan yang sangat signifikan saat dimana pasca krisis moneter antara tahun 1997-1999, bahkan pada tahun 1999 angkanya mencapai 10,4% di Provinsi Lampung dan ini menjadi tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi selama 18 tahun terakhir. Pada tahun 2002-2006 persentase tingkat Pengangguran terbuka di Provinsi Lampung tidaklah bagus, dikarenakan terjadi kenaikan dan penurunan

yang tidak menentu. Pada tahun 2007-2012 mulailah terjadi penurunan terus-menerus dalam persentase pertumbuhan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Lampung. Jumlah persentase tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2007 dengan persentase pertumbuhan 7,58 % dan enam tahun kemudian tepatnya pada tahun 2012 jumlah persentase untuk tingkat pengangguran terbuka menjadi 5,18%. Hal tersebut menunjukkan bahwa perekonomian dan kesempatan kerja dalam rangka mengurangi pengangguran di Provinsi Lampung mengalami progres yang meningkat dan sangat baik.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah diharapkan mampu menggali secara optimal sumber-sumber keuangan, mengelola, dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya. Dengan demikian pelaksanaan otonomi daerah akan menciptakan kemandirian fiskal bagi daerah kabupaten/kota. Kemandirian keuangan menjadi hal yang sangat penting bagi daerah, terutama terkait dengan sumbangan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri sehingga daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi belanja publik pada bidang kesehatan dan pendidikan, pemerataan tingkat pendapatan serta penurunan angka kemiskinan melalui peningkatan pembangunan manusia yang tercermin dari angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pemerintah dalam hal ini memiliki berbagai peran dalam perekonomian. Terdapat tiga peran utama yang harus dapat dilaksanakan dengan baik dalam perekonomian oleh pemerintah, yaitu: (1) Peran Stabilisasi, pemerintah lebih berperan sebagai stabilisator untuk menjaga agar perekonomian berjalan normal.

Menjaga agar permasalahan yang terjadi pada satu sektor perekonomian tidak merembet ke sektor lain. (2) Peran Distribusi, Pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan agar alokasi sumber daya ekonomi dilaksanakan secara efisien agar kekayaan suatu negara dapat terdistribusi secara baik dalam masyarakat. (3) Peran Alokasi, Pada dasarnya sumber daya yang dimiliki suatu negara adalah terbatas. Pemerintah harus menentukan seberapa besar dari sumber daya yang dimiliki akan dipergunakan untuk memproduksi barang-barang publik, dan seberapa besar akan digunakan untuk memproduksi barang-barang individu. Pemerintah harus menentukan dari barang-barang publik yang diperlukan warganya, seberapa besar yang harus disediakan oleh pemerintah, dan seberapa besar yang dapat disediakan oleh rumah tangga perusahaan.

Dengan adanya Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD), suatu daerah dapat memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah, lalu membelanjakan dana tersebut sesuai program dan kegiatan yang telah ditentukan dalam peraturan daerah setempat. Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan tentunya membutuhkan modal manusia yang berkualitas sebagai modal dasar pembangunan. Manusia dalam perannya merupakan subjek dan objek pembangunan yang berarti manusia selain sebagai pelaku dari pembangunan juga merupakan sasaran pembangunan.

Untuk menghasilkan manusia yang berkualitas juga diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Dalam hal ini dibutuhkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendorong peran manusia dalam pembangunan. Pemerintah melakukan pengeluaran atau investasi yang ditujukan

untuk pembangunan manusia. Pengeluaran pemerintah merupakan cerminan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dalam hal ini pengeluaran pemerintah tersebut digunakan untuk membiayai sektor publik yang lebih penting dan menjadi prioritas dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang tercermin pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Dalam penelitian ini hanya dibatasi pada variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan. Sesuai dengan teori Indeks Pembangunan Manusia, yang menekankan sangat pentingnya peran pemerintah didalam kedua sektor tersebut. Dikarenakan beberapa tahun terakhir ini pemerintah telah mengeluarkan banyak kebijakan yang berhubungan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia itu sendiri, melalui peningkatan mutu kesehatan dan pendidikan di Provinsi Lampung. Tentunya untuk merealisasikan kebijakan tersebut pemerintah telah mengalokasikan dalam anggaran belanjanya yang mengharuskan agar mengalokasikan 20% untuk sektor pendidikan dan 10% untuk sektor kesehatan dari total APBN maupun APBD sesuai dengan UU No. 20 tahun 2003 Pasal 49 tentang pendidikan dan UU No. 36 tahun 2009 Pasal 171 tentang kesehatan. Berikut ini adalah data tentang jumlah realisasi pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan di Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini:

Tabel 1.5
Tingkat Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan
tahun 1999-2014 di Provinsi Lampung

Tahun	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan
2006	38.622.654.461	106.173.200.065
2007	86.285.614.336	54.296.263.007
2008	75.431.164.716	160.866.569.603
2009	268.196.397.636	180.000.000.000
2010	236.025.869.519	119.332.118.836
2011	296.885.831.608	190.243.253.433
2012	284.422.915.478	260.975.962.752
2013	300.193.983.238	323.047.278.382
2014	295.664.882.843	334.893.405.336

Sumber: Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan bagian Keuangan Provinsi Lampung (diolah).

Berdasarkan tabel 3 dapat dikatakan bahwa Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan di Provinsi Lampung pada tahun 1995-2012 cenderung mengalami peningkatan, terkecuali mengalami penurunan disaat masa krisis moneter antara tahun 1997-1998. Akan tetapi penurunan tersebut hanya terjadi dua tahun itu saja, dan pada tahun – tahun seterusnya pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan selalu mengalami peningkatan dari segupendanaan dan pelayanannya. Dengan demikian ini sangat berdampak positif bagi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini akan dilihat sejauh manapengaruh beberapa faktor seperti, tingkat Pengangguran Terbuka, Kemiskinan serta Pengeluaran pemerintah di sektor Pendidikan dan Kesehatan dapat mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung. Oleh karena itu penelitian ini berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung Tahun 1999-2014”.

1.2 Rumusan Masalah

Pembangunan manusia merupakan suatu bentuk investasi modal manusia dalam usaha ikut serta dalam pembangunan nasional. Oleh karenanya dibutuhkan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah peningkatan pembangunan manusia. Dengan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun serta menurunnya tingkat pengangguran, laju Indeks Pembangunan Manusia sudah seharusnya juga dapat meningkat secara signifikan. Sementara itu dibantu juga dengan semakin membaiknya fasilitas serta pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan yang menggunakan anggaran pengeluaran pemerintah dimana dari tahun ke tahun semakin meningkat maka akan berdampak pada pembangunan manusia di Provinsi Lampung.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dalam makalah ini, maka permasalahan yang akan dipelajari adalah:

1. Bagaimana pengaruh antara tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Lampung terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung tahun 1999-2014?

2. Bagaimana pengaruh antara tingkat Pengeluaran Pemerintah sektor kesehatan Provinsi Lampung terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung tahun 1999-2014 ?
3. Bagaimana pengaruh antara tingkat Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Provinsi Lampung terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung tahun 1999-2014 ?
4. Bagaimana pengaruh antara tingkat Kemiskinan Provinsi Lampung terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung tahun 1999-2014 ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung tahun 1999-2014.
2. Untuk menganalisis pengaruh tingkat Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung tahun 1999-2014.
3. Untuk menganalisis pengaruh tingkat Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung tahun 1999-2014.
4. Untuk menganalisis pengaruh tingkat kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung tahun 1999-2014.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan pihak – pihak lain yang berkepentingan, yaitu bagi :

1. Bagi penulis, penelitian ini sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Selain itu dari penelitian ini diharapkan penulis dapat mengerti berbagai macam faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia.
2. Bagi dunia ilmu pengetahuan, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran atau studi banding bagi mahasiswa atau pihak yang melakukan penelitian yang sejenis.
3. Bagi pemerintah dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan ekonomi terutama tentang peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang masing – masing dijelaskan secara singkat.

BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

1. Kajian Pustaka

Bagian tersebut berisi tentang pendokumentasian dan pengkajian hasil – hasil penelitian terdahulu dengan topik yang sama, sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan penelitian.

2. Landasan Teori

Berisi tentang teori – teori yang digunakan sebagai dasar untuk mendekati permasalahan yang sedang diteliti. Landasan teori tersebut digunakan untuk memberikan diskusi yang lengkap tentang hubungan antar variabel yang terkait.

3. Hipotesis

Berisi tentang jawaban sementara mengenai rumusan masalah yang disesuaikan dengan penelitian terdahulu dan teori yang ada, sehingga hipotesis yang disusun merupakan pernyataan yang menjawab pertanyaan pada rumusan masalah.

Secara keseluruhan bab kajian pustaka dan landasan teori ini membahas secara terperinci mengenai kajian pustaka, uraian landasan teori dari variabel – variabel yang digunakan, teori – teori yang relevan sehingga dapat mendukung penelitian, serta hipotesis yang digunakan.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang beberapa hal yaitu jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, dan metode analisis yang digunakan.

BAB IV. HASIL, ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang deskripsi data, pengujian hipotesis yang telah dibuat, pembahasan, hasil penelitian serta penjelasannya.

BAB V. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan pelaksanaan penelitian, keterbatasan dan saran untuk penelitian selanjutnya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN

2.1 Kajian Pustaka

Tria, Toto dan Saimul (2014) melakukan penelitian dengan judul "analisis pengaruh pendapatan asli daerah dan pengeluaran pemerintah terhadap perkembangan ekonomi provinsi Lampung tahun 2000 – 2013", dalam penelitian tersebut menggunakan metode analisis pertumbuhan ekonomi Neo Klasik Solow (*Neoclassical Growth Model*), dengan fungsi *agregat* standar. Adapun hasil penelitian tersebut adalah investasi pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi Neo Klasik Solow (*Neoclassical Growth Model*), dengan fungsi *agregat* standar pertumbuhan ekonomi Neo Klasik Solow (*Neoclassical Growth Model*), dengan fungsi *agregat* standar pertumbuhan ekonomi Neo Klasik Solow (*Neoclassical Growth Model*), dengan fungsi *agregat* standar.

Baeti (2013), melakukan penelitian dengan judul "pengaruh pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah terhadap pembangunan manusia kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah tahun 2007 – 2011", dalam penelitian ini menggunakan metode data panel. Hasil dari penelitian ini adalah alokasi pengeluaran pemerintah sektor publik tidak secara langsung mempengaruhi IPM ataupun kemiskinan, namun secara bersama-sama (simultan) pengeluaran sektor publik dan IPM dapat mempengaruhi kemiskinan. Hal tersebut berarti bahwa pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan

kesehatan tidak bisa berdiri sendiri sebagai variabel independendalam mempengaruhi kemiskinan, namun harus berinteraksi dengan variabel lain (variabelIPM). Hal ini juga diperkuat dengan hasil studi yang menunjukkan bahwa selain berperan sebagaivariabel *pure moderator*, IPM juga berperan sebagai variabel intervening (2008), dalamkaitannya dengan hubungan antara pengeluaran di sektor pendidikan dan kesehatan dengan pengentasan kemiskinan. Sehingga implikasi dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan akan dapat mempengaruhi kemiskinan jika pengeluaran tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pembangunan manusia.

Maryani (2010), melakukan penelitian dengan judul “analisis indeks pembangunan manusia di provinsi jawa tengah”. Penelitian ini menggunakan metode data panel. Hasil dari penelitian ini adalah pengeluaran pemerintah bidang pendidikan yang telah dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2007-2009. Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan yang telah dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2007-2009. Hal ini telah sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa besarnya pengeluaran pemerintah bidang pendidikan akan berpengaruh positif dan signifikan. Jumlah penduduk miskin berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2007-2009. Hal ini telah sesuai dengan

hipotesis yang menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin berkurang akan menaikkan IPM.

Brata (2002), melakukan penelitian dengan judul “pembangunan manusia dan kinerja ekonomi regional di Indonesia”. Dalam penelitian ini menggunakan metode yang digunakan diadaptasi dari model yang telah digunakan oleh Ramirez dkk (1998). Hasil dari penelitian ini adalah Hasil estimasi memberikan bukti adanya hubungan dua arah antara pembangunan manusia dan pembangunan ekonomi regional di Indonesia, termasuk di masa krisis. Pembangunan manusia yang berkualitas mendukung pembangunan ekonomi dan sebaliknya kinerja ekonomi yang baik mendukung pembangunan manusia. Namun dalam masing-masing hubungan ini juga disertai dengan berperannya variabel-variabel lainnya seperti peran perempuan dan tingkat ketersediaan sumber daya alam. Adapun variabel boneka konflik tidak berpengaruh signifikan baik terhadap pembangunan manusia maupun ekonomi regional. Barangkali hasilnya akan berbeda bila yang digunakan adalah data korban konflik. Hanya saja data tersebut sangat terbatas ketersediaannya.

Berdasarkan temuan yang ada, perlu digaris bawahi adalah bahwa pembangunan ekonomi haruslah tidak mengabaikan pembangunan manusia. Hal ini penting bukan hanya untuk mengurangi disparitas regional baik dalam hal pembangunan manusia maupun kinerja ekonomi regional itu sendiri, tetapi juga karena pertumbuhan ekonomi sendiri belumlah memadai untuk secara otomatis meningkatkan kualitas modal manusia.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Sejak tahun 1990, *United Nations Development Programme* (UNDP) telah menerbitkan laporantahunan berupa *Human Development Report* (HDR). Dalam HDR tersebut dikeluarkan laporan tahunan mengenai indek pembangunan manusia/*Human DevelopmentIndex* (HDI) di tiap negara. Indeks tersebut dikembangkan pada tahun 1990 oleh seorang peraih Hadiah Nobel berkebangsaan India yaitu Amartya Sen, dan seorang ekonom dari Pakistan, Mahbub Ul Haq, yang dibantu oleh Gustav Ranis dari Yale University dan Lord Meghnad Desai dari *London School of Economic*. Sen menyatakan bahwa HDI adalah sebuah pengukuran indeks manusia yang cukup kasar (*vulgar measure*) karena masih banyak keterbatasan. Namun, HDI menerapkan ukuran pada aspek-aspek pengembangan kualitas manusia secara lebih komprehensif daripada hanya sekedar pendapatan per kapita seperti yang dilakukan selama ini dalam menentukan atau menunjukkan apakah suatu negara itu negara maju, berkembang, atau belum berkembang. HDI juga merupakan salah satu bahan kajian atau topik pembahasan bagi para peneliti untuk meneliti ukuran-ukuran kualitas manusia di sebuah negara secara luas dan beragam.

Dalam *Human Development Report* (UNESCO, 2007) dijelaskan bahwa *Human DevelopmentIndex* (HDI) merupakan suatu konstruksi pengukuran atas dasar konsep *right based approach to humandevelopment*. HDI melakukan

pengukuran rata-rata capaian setiap individu negara yang menyangkut tiga dimensi dasar dari proses pengembangan kualitas manusia. Manusia yang dapat hidup sehat dan panjang umur, sebagaimana diukur dengan Angka Harapan Hidup sejak waktu lahir (*life expectancy at birth*). Manusia yang memiliki kecakapan dan pendidikan yang diperlukan bagi hidupnya, sebagaimana diukur melalui indikator angka literasi orang dewasa (*adult literacy rate*) dengan bobot penilaian dua pertiga, serta indikator kombinasi Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan dasar, menengah dan tinggi dengan bobot penilaian satu pertiga dari penghitungan indeks pendidikan.

Manusia yang dapat mencapai standar hidup layak, sebagaimana diukur dengan logaritma pendapatan domestik bruto (PDB) per kapita yang menggunakan indikator *purchasing power parity* (PPP) yang dihitung dalam dolar Amerika. Pembangunan manusia yang dimaksudkan dalam IPM tidak sama dengan pengembangan sumber daya manusia yang biasanya dimaksudkan dalam teori ekonomi. Sumber daya manusia menunjuk pada manusia sebagai salah satu faktor produksi, yaitu sebagai tenaga kerja yang produktivitasnya harus ditingkatkan. Dalam hal ini manusia hanya sebagai alat (*input*) untuk mencapai tujuan yaitu peningkatan output barang dan jasa. Sedangkan manusia di dalam IPM lebih diartikan sebagai tujuan pembangunan yang orientasi akhirnya pada peningkatan kesejahteraan.

2.2.2 Pengangguran

Pengangguran merupakan suatu ukuran yang dilakukan jika seseorang tidak memiliki pekerjaan tetapi mereka sedang melakukan usaha secara aktif

dalam empat minggu terakhir untuk mencari pekerjaan (Kaufman dan Hotchkiss,1999). Pengangguran merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi mereka belum dapat memperoleh pekerjaan tersebut (Sadono Sukirno, 1994). Pengangguran dapat terjadi disebabkan oleh ketidakseimbangan pada pasar tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah tenaga kerja yang diminta. Menurut Sadono Sukirno (1994), pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Seseorang yang tidak bekerja, tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai penganggur. Faktor utama yang menimbulkan pengangguran adalah kekurangan pengeluaran agregat.

Para pengusaha memproduksi barang dan jasa dengan maksud untuk mencari keuntungan. Keuntungan tersebut hanya akan diperoleh apabila para pengusaha dapat menjual barang yang mereka produksi. Semakin besar permintaan, semakin besar pula barang dan jasa yang akan mereka wujudkan. Kenaikan produksi yang dilakukan akan menambah penggunaan tenaga kerja. Dengan demikian, terdapat hubungan yang erat diantara tingkat pendapatan nasional yang dicapai (GDP) dengan penggunaan tenaga kerja yang dilakukan; semakin tinggi pendapatan nasional (GDP), semakin banyak penggunaan tenaga kerja dalam perekonomian. 44 Berdasarkan penyebabnya pengangguran dapat dibagi empat kelompok (Sadono Sukirno, 1994) : a. Pengangguran normal atau friksional Apabila dalam suatu ekonomi terdapat pengangguran sebanyak dua atau

tiga persen dari jumlah tenaga kerja maka ekonomi itu sudah dipandang sebagai mencapai kesempatan kerja penuh. Pengangguran sebanyak dua atau tiga persen tersebut dinamakan pengangguran normal atau pengangguran friksional. Para penganggur ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh kerja, tetapi karena sedang mencari kerja lain yang lebih baik. Dalam perekonomian yang berkembang pesat, pengangguran adalah rendah dan pekerjaan mudah diperoleh. Sebaliknya pengusaha susah memperoleh pekerja, Akibatnya pengusaha menawarkan gaji yang lebih tinggi. Hal ini akan mendorong para pekerja untuk meninggalkan pekerjaannya yang lama dan mencari pekerjaan baru yang lebih tinggi gajinya atau lebih sesuai dengan keahliannya.

Dalam proses mencari kerja baru ini untuk sementara para pekerja tersebut tergolong sebagai penganggur. Mereka inilah yang digolongkan sebagai pengangguran normal. b. Pengangguran siklikal Perekonomian tidak selalu berkembang dengan teguh. Adakalanya permintaan agregat lebih tinggi, dan ini mendorong pengusaha menaikkan produksi. Lebih banyak pekerja baru digunakan dan pengangguran berkurang. Akan tetapi pada masa lainnya permintaan agregat menurun dengan banyaknya. Misalnya, di negara-negara produsen bahan mentah pertanian, penurunan ini mungkin disebabkan kemerosotan harga-harga komoditas. Kemunduran ini menimbulkan efek kepada perusahaan-perusahaan lain yang berhubungan, yang juga akan mengalami kemerosotan dalam permintaan terhadap produksinya. Kemerosotan permintaan agregat ini mengakibatkan perusahaan-perusahaan mengurangi pekerja atau menutup perusahaannya, sehingga pengangguran akan bertambah. Pengangguran dengan wujud tersebut dinamakan

pengangguran siklikal. c. Pengangguran struktural Tidak semua industri dan perusahaan dalam perekonomian akan terus berkembang maju, sebagiannya akan mengalami kemunduran. Kemerosotan ini ditimbulkan oleh salah satu atau beberapa faktor berikut: wujudnya barang baru yang lebih baik, kemajuan teknologi mengurangi permintaan ke atas barang tersebut, biaya pengeluaran sudah sangat tinggi dan tidak mampu bersaing, dan ekspor produksi industri itu sangat menurun oleh karena persaingan yang lebih serius dari negaranegara lain. Kemerosotan itu akan menyebabkan kegiatan produksi dalam industri tersebut menurun, dan sebagian pekerja terpaksa diberhentikan dan menjadi penganggur. Pengangguran yang wujud digolongkan sebagai pengangguran struktural. Dinamakan demikian karena disebabkan oleh perubahan struktur kegiatan ekonomi.

Pengangguran teknologi Pengangguran dapat pula ditimbulkan oleh adanya penggantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia. Racun lalang dan rumput, misalnya, telah mengurangi penggunaan tenaga kerja untuk membersihkan perkebunan, sawah 46 dan lahan pertanian lain. Begitu juga mesin telah mengurangi kebutuhan tenaga kerja untuk membuat lubang, memotong rumput , membersihkan kawasan, dan memungut hasil. Sedangkan di pabrik-pabrik, ada kalanya robot telah menggantikan kerja-kerja manusia. Pengangguran yang ditimbulkan oleh penggunaan mesin dan kemajuan teknologi lainnya dinamakan pengangguran teknologi. Berdasarkan cirinya, Pengangguran dibagi ke dalam empat kelompok (Sadono Sukirno, 1994) : a. Pengangguran terbuka Pengangguran ini tercipta sebagai akibat penambahan lowongan pekerjaan yang

lebih rendah dari penambahan tenaga kerja. Sebagai akibatnya dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. Efek dari keadaan ini di dalam suatu jangka masa yang cukup panjang mereka tidak melakukan suatu pekerjaan. Jadi mereka menganggur secara nyata dan separuh waktu, dan oleh karenanya dinamakan pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka dapat pula wujud sebagai akibat dari kegiatan ekonomi yang menurun, dari kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga kerja, atau sebagai akibat dari kemunduran perkembangan sesuatu industri.

b. Pengangguran tersembunyi Pengangguran ini terutama wujud di sektor pertanian atau jasa. Setiap kegiatan ekonomi memerlukan tenaga kerja, dan jumlah tenaga kerja yang digunakan tergantung pada banyak faktor, faktor yang perlu dipertimbangkan adalah besar kecilnya perusahaan, jenis kegiatan perusahaan, mesin yang digunakan (apakah 47 intensif buruh atau intensif modal) dan tingkat produksi yang dicapai. Di banyak negara berkembang seringkali didapati bahwa jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi adalah lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan supaya ia dapat menjalankan kegiatannya dengan efisien. Kelebihan tenaga kerja yang digunakan digolongkan dalam pengangguran tersembunyi. Contoh-contohnya ialah pelayan restoran yang lebih banyak dari yang diperlukan dan keluarga petani dengan anggota keluarga yang besar yang mengerjakan luas tanah yang sangat kecil.

c. Pengangguran bermusim Pengangguran ini terutama terdapat di sektor pertanian dan perikanan. Pada musim hujan penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur.

Pada musim kemarau pula para petani tidak dapat mengerjakan tanahnya. Di samping itu pada umumnya para petani tidak begitu aktif di antara waktu sesudah menanam dan sesudah menuai. Apabila dalam masa tersebut para penyadap karet, nelayan dan petani tidak melakukan pekerjaan lain maka mereka terpaksa menganggur. Pengangguran seperti ini digolongkan sebagai pengangguran bermusim. d. Setengah menganggur Pada negara-negara berkembang penghijrahan atau migrasi dari desa ke kota adalah sangat pesat. Sebagai akibatnya tidak semua orang yang pindah ke kota dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah. Sebagiannya terpaksa menjadi penganggur sepenuh waktu. Di samping itu ada pula yang tidak menganggur, tetapi tidak pula bekerja sepenuh waktu, dan jam kerja mereka adalah jauh lebih rendah dari yang 48 normal. Mereka mungkin hanya bekerja satu hingga dua hari seminggu, atau satu hingga empat jam sehari. Pekerja-pekerja yang mempunyai masa kerja seperti yang dijelaskan ini digolongkan sebagai setengah menganggur (underemployed). Dan jenis penganggurannya dinamakan underemployment. Pengangguran akan muncul dalam suatu perekonomian disebabkan oleh tiga hal (Kaufman dan Hotckiss, 1999) : a. Proses mencari kerja Pada proses ini menyediakan penjelasan teoritis yang penting bagi tingkat pengangguran. Munculnya angkatan kerja baru akan menimbulkan persaingan yang ketat pada proses mencari kerja. Dalam proses ini terdapat hambatan dalam mencari kerja yaitu disebabkan karena adanya para pekerja yang ingin pindah ke pekerjaan lain, tidak sempurnanya informasi yang diterima pencari kerja mengenai lapangan kerja yang tersedia, serta informasi yang tidak sempurna pada besarnya tingkat upah yang layak mereka

terima, dan sebagainya. b. Kekakuan upah Besarnya pengangguran yang terjadi dipengaruhi juga oleh tingkat upah yang tidak fleksibel dalam pasar tenaga kerja. Penurunan pada proses produksi dalam perekonomian akan mengakibatkan pergeseran atau penurunan pada permintaan tenaga kerja. Akibatnya, akan terjadi penurunan besarnya upah yang ditetapkan. Dengan adanya kekakuan upah, dalam jangka pendek, tingkat upah akan mengalami kenaikan pada tingkat upah semula.

Hal ini akan menimbulkan kelebihan penawaran (*excess supply*) pada tenaga kerja sebagai inflasi dari adanya tingkat pengangguran akibat kekakuan upah yang terjadi. Efisiensi upah Besarnya pengangguran juga dipengaruhi oleh efisiensi pada teori pengupahan. Efisiensi yang terjadi pada fungsi tingkat upah tersebut terjadi karena semakin tinggi perusahaan membayar upah maka akan semakin keras usaha para pekerja untuk bekerja (walaupun akan muncul juga kondisi dimana terjadi *diminishing rate*). Hal ini justru akan memberikan konsekuensi yang buruk jika perusahaan memilih membayar lebih pada tenaga kerja yang memiliki efisiensi lebih tinggi maka akan terjadi pengangguran terpaksa akibat dari persaingan yang ketat dalam mendapatkan pekerjaan yang diinginkan

2.2.2.1 Hubungan Pengangguran Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Menurut Sukirno (2004) bahwa salah satu faktor penting yang menentukankemakmuran masyarakat adalah tingkat pendapatan. Pendapatan masyarakat mencapaimaksimum apabila tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dapat terwujud, sehinggaapabila tidak bekerja atau menganggur maka akan

mengurangi pendapatan dan hal ini akan mengurangi tingkat kemakmuran yang mereka capai sehingga dapat menimbulkan buruknya kesejahteraan masyarakat.

Kualitas Sumberdaya Manusia yang dapat dilihat dari nilai Indeks Pembangunan Manusia dapat menjadi penyebab terjadinya penduduk miskin karena pengangguran. Tingginya jumlah pengangguran akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja yang berimbas pada rendahnya perolehan pendapatan. Sehingga dengan tingginya jumlah pengangguran menyebabkan rendahnya Indeks Pembangunan Manusia.

2.2.3 Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan

Beberapa ekonom menganggap bahwa kesehatan merupakan fenomena ekonomi, baik jika dinilai dari stok maupun sebagai investasi. Sehingga fenomena kesehatan menjadi variabel yang nantinya dapat dianggap sebagai faktor produksi untuk meningkatkan nilai tambah barang dan jasa, atau sebagai suatu sasaran dari tujuan-tujuan yang ingin dicapai baik oleh individu, rumah tangga maupun masyarakat, yang dikenal sebagai tujuan kesejahteraan. Oleh karena itu kesehatan dianggap sebagai modal dan memiliki tingkat pengembalian yang positif baik untuk individu maupun untuk masyarakat.

Dana untuk kesehatan yang diatur pada UU No 36 tahun 2009 menyebutkan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah dialokasikan minimal 5 persen dari APBN di luar gaji, sementara besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/kota dialokasikan minimal 10 persen dari APBD di luar gaji, oleh karena itu sudah semestinya pemerintah harus dapat menyediakan

pelayanan publik yang memadai dalam rangka peningkatan kualitas pembangunan manusia yang selanjutnya dapat meningkatkan IPM. Anggaran belanja yang dialokasikan untuk pembiayaan kesehatan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 sekitar 6,04 persen dari seluruh pembiayaan kabupaten/kota. Hal ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2007 sebesar 6,32 persen dan masih di bawah target Indonesia Sehat 2010 sebesar 15 persen (Profil Kesehatan Jawa Tengah, 2008).

2.2.3.1 Hubungan Antara Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan

Menurut Mahmudi (2007), pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan penyelenggara pelayanan publik adalah instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

kesehatan yang baik akan meningkatkan kapasitas dan kemerdekaan hidup yang dinamakan manfaat intrinsik. kesehatan berperan membuka peluang yang lebih besar untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi yang dinamakan manfaat instrumental (Lanjouw, dkk 2001:112).

Pengeluaran pemerintah pada belanja pembangunan, merupakan investasi sekaligus campur tangan pemerintah dalam mewujudkan peningkatan indeks pembangunan manusia di Indonesia..

2.2.4. Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan

Mengacu pada UU No 20 tahun 2003 dimana menyebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari APBD. Negara-negara yang maju dapat dilihat dari tingginya tingkat pendidikan masyarakatnya karena tersedianya pelayanan pendidikan yang menunjang dan memadai. Peranan dominan pemerintah dalam pasar pendidikan tidak hanya mencerminkan masalah kepentingan pemerintah tetapi juga aspek ekonomi khusus yang dimiliki oleh sektor pendidikan, karena karakteristik yang ada pada sektor pendidikan yaitu sebagai berikut (Achsana dalam Rica Amanda, 2010) :

1. Pengeluaran pendidikan sebagai investasi
2. Eksternalitas
3. Pengeluaran bidang pendidikan dan implikasinya terhadap kebijakan publik.
4. *Rate of return pendidikan*

2.2.4.1 Hubungan Antara Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Terhadap IPM

Teori Rostow dan Musgrave adalah pandangan yang timbul dari pengamatan atas pengalaman pembangunan ekonomi yang dialami banyak negara tetapi tidak didasari oleh suatu teori tertentu. Selain tidak jelas apakah tahap pertumbuhan ekonomi terjadi dalam tahap demi tahap atau beberapa tahap dapat terjadi secara simultan. Pendidikan dan kesehatan yang baik akan meningkatkan kapasitas dan kemerdekaan hidup yang dinamakan manfaat intrinsik. Pendidikan

dan kesehatan berperan membuka peluang yang lebih besar untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi yang dinamakan manfaat instrumental (Lanjouw, dkk 2001:112).

Pendidikan sangat menentukan kemampuan untuk menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baik dalam kaitannya dengan teknologi sampai kelembagaan yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan pendidikan yang baik, pemanfaatan teknologi ataupun inovasi teknologi menjadi mungkin untuk terjadi. Seperti diungkapkan oleh Meier dan Rauch dikatakan pendidikan, atau lebih luas lagi adalah modal manusia, dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan.

2.2.5 Tingkat kemiskinan

Chamber yang dikutip dalam Suradi (2007) mendefinisikan kemiskinan sebagai “... suatu keadaan melarat dan ketidakberuntungan, suatu keadaan minus (deprivation)”, bila dimasukkan dalam konteks tertentu, hal itu berkaitan dengan “minimnya pendapatan dan harta, kelemahan fisik, isolasi, kerapuhan dan ketidakberdayaan”. Kemudian oleh Amartya Sen dalam Suradi (2007) mengungkapkan bahwa terdapat inti absolut dari kemiskinan. Kelaparan yang melanda mereka menjadi sebuah perspektif dari kemiskinan, demikian juga dengan ketidakmampuan dalam kehinaan sosial dan ketidakmampuan dalam mendidik anak-anak (pendidikan) serta merawat kesehatan anak-anak. Garis kemiskinan absolut sangat penting untuk menilai efek dari kebijakan anti kemiskinan antar waktu, atau memperkirakan dampak dari suatu proyek terhadap

kemiskinan (misalnya, pemberian kredit skala kecil). Angka kemiskinan akan terbanding antara satu negara dengan negara lain hanya jika garis kemiskinan absolute yang sama digunakan di kedua negara tersebut. Bank Dunia memerlukan garis kemiskinan absolut agar dapat membandingkan angka kemiskinan antar negara. Hal ini bermanfaat dalam menentukan kemana menyalurkan sumber daya finansial (dana) yang ada, juga dalam menganalisis kemajuan dalam memerangi kemiskinan. Pada umumnya ada dua ukuran yang digunakan oleh Bank Dunia, yaitu : a) US \$ 1 perkapita per hari dimana diperkirakan ada sekitar 1,2 miliar penduduk dunia yang hidup dibawah ukuran tersebut; b) US \$ 2 perkapita per hari dimana lebih dari 2 miliar penduduk yang hidup kurang dari batas tersebut. US dollar yang digunakan adalah US \$ PPP (Purchasing Power Parity), bukan nilai tukar resmi (exchange rate). Kedua batas ini adalah garis kemiskinan absolut (BPS Jateng, 2008)

2.2.5.1 Hubungan Antara Tingkat kemiskinan terhadap IPM

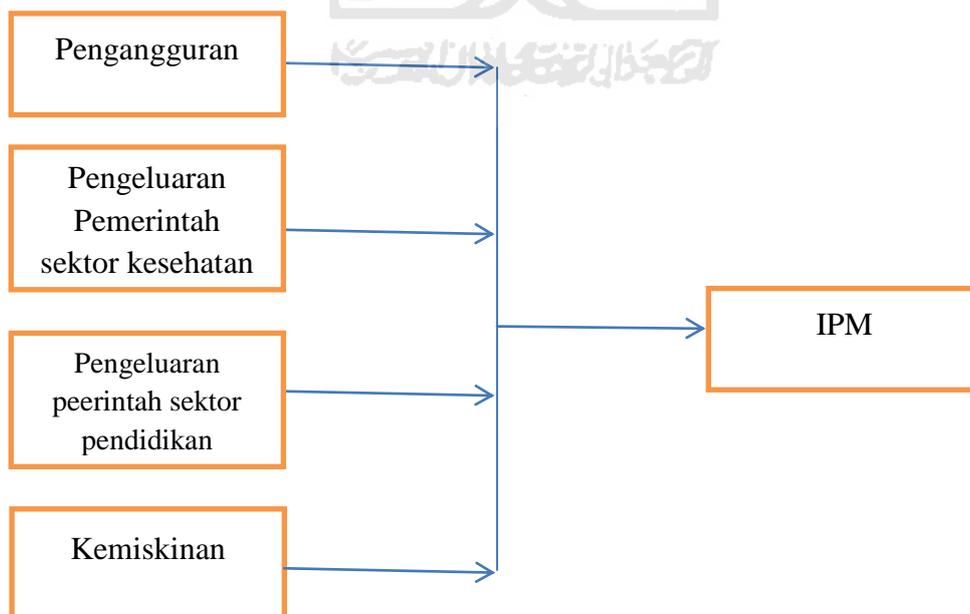
Penelitian yang dilakukan oleh Suradi (2007) yang berjudul “Pembangunan Manusia, Kemiskinan, dan Kesejahteraan” dimana hasil analisis deskriptifnya menyatakan bahwa kemiskinan berkaitan erat dan ikut menentukan proses pembangunan yang mengedepankan partisipasi masyarakat. Paradigma pembangunan yang kini bergeser dari dominasi peran negara kepada peran masyarakat tidak akan dapat diwujudkan apabila jumlah penduduk miskin masih cukup signifikan. Hal demikian dikarenakan pada umumnya penduduk miskin lebih banyak menghabiskan tenaga dan waktu yang ada untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Mereka tidak tertarik untuk melibatkan diri pada aktivitas-

aktivitas yang tidak secara langsung berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar. Hasil penelitian tersebut memperjelas bahwa semakin tinggi populasi penduduk miskin akan menekan tingkat pembangunan manusia, sebab penduduk miskin memiliki daya beli yang rendah.

2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan salah satu bagian dari tinjauan pustaka yang didalamnya berisikan rangkuman dari seluruh dasar – dasar teori yang ada dalam penelitian ini, dimana dalam kerangka penelitian ini digambarkan skema singkat mengenai proses penelitian yang dilakukan. Adapun skema tersebut adalah sebagai berikut :

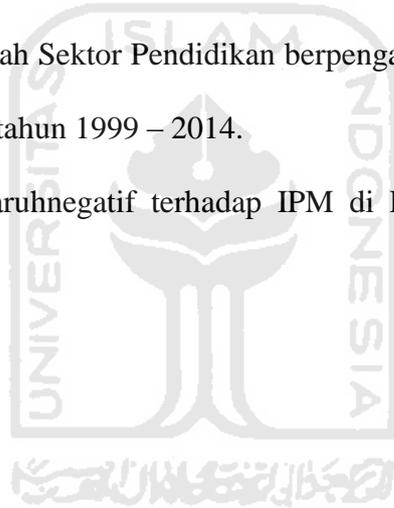
Gambar 2.1 Kerangka pemikiran



2.4.Hipotesis

Dalam penelitian ini, analisis menggunakan asumsi – asumsi sebagai berikut :

- a. Pengangguran berpengaruh negatif terhadap IPM di Provinsi Lampung tahun 1999 - 2014.
- b. Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan berpengaruh positif terhadap IPM di Provinsi Lampung tahun 1999 - 2014.
- c. Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan berpengaruh positif terhadap IPM di Provinsi Lampung tahun 1999 – 2014.
- d. Kemiskinan berpengaruh negatif terhadap IPM di Provinsi Lampung tahun 1999 - 2014



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data *time series* tahunan dari tahun 1999-2014. Jenis data yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia, pengangguran, PDRB, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan. Data yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, dan data lain yang bersumber dari referensi kepustakaan melalui makalah, artikel, jurnal, dan bahan lainnya.

3.2 Definisi Operasional Variabel

1. Indeks Pembangunan Manusia

IPM dapat mengetahui kondisi pembangunan di daerah dengan alasan:

- a. IPM menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam pembangunan kualitas manusia.
- b. IPM menjelaskan tentang bagaimana manusia mempunyai kesempatan untuk mengakses hasil dari proses pembangunan, sebagai bagian dari haknya seperti dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan.

- c. IPM digunakan sebagai salah satu ukuran kinerja daerah, khususnya dalam hal evaluasi terhadap pembangunan kualitas hidup masyarakat/penduduk.
- d. Meskipun dapat menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam pembangunan kualitas hidup manusia, tetapi IPM belum tentu mencerminkan kondisi sesungguhnya namun untuk saat ini merupakan satu-satunya indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pembangunan kualitas hidup manusia

2. Pengangguran

Menurut Sadono Sukirno (1994), pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Seseorang yang tidak bekerja, tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai penganggur. Faktor utama yang menimbulkan pengangguran adalah kekurangan pengeluaran agregat.

3. Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan

Beberapa ekonom menganggap bahwa kesehatan merupakan fenomena ekonomi, baik jika dinilai dari stok maupun sebagai investasi. Sehingga fenomena kesehatan menjadi variabel yang nantinya dapat dianggap sebagai faktor produksi untuk meningkatkan nilai tambah barang dan jasa, atau sebagai suatu sasaran dari tujuan-tujuan yang ingin dicapai baik oleh individu, rumah tangga maupun masyarakat, yang dikenal sebagai tujuan kesejahteraan. Oleh karena itu kesehatan dianggap sebagai modal dan

memiliki tingkat pengembalian yang positif baik untuk individu maupun untuk masyarakat.

4. Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan

Mengacu pada UU No 20 tahun 2003 dimana menyebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari APBD. Negara-negara yang maju dapat dilihat dari tingginya tingkat pendidikan masyarakatnya karena tersedianya pelayanan pendidikan yang menunjang dan memadai.

5. Kemiskinan

Chamber yang dikutip dalam Suradi (2007) mendefinisikan kemiskinan sebagai “... suatu keadaan melarat dan ketidakberuntungan, suatu keadaan minus (deprivation)”, bila dimasukkan dalam konteks tertentu, hal itu berkaitan dengan “minimnya pendapatan dan harta, kelemahan fisik, isolasi, kerapuhan dan ketidakberdayaan”. Kemudian oleh Amartya Sen dalam Suradi (2007) mengungkapkan bahwa terdapat inti absolut dari kemiskinan. Kelaparan yang melanda mereka menjadi sebuah perspektif dari kemiskinan, demikian juga dengan ketidakmampuan dalam kehinaan sosial dan ketidakmampuan dalam mendidik anak-anak (pendidikan) serta merawat kesehatan anak-anak.

3.3 Metode analisis data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Regresi linier berganda berfungsi untuk menjelaskan hubungan penengaruh antara variabel dependen dengan variabel independen. Regresi linier juga memiliki fungsi sebagai pengukur intensitas seberapa besar penengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Rumus regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

Y adalah Indeks Pembangunan Manusia

X1 adalah Pengangguran

X2 adalah Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan

X3 adalah Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan

X4 adalah Kemiskinan

Regresi linier berganda memiliki beberapa jenis pengujian dalam pembuktian hipotesis. Hal ini untuk mengetahui hubungan variabel dependen terhadap variabel independen. Dibutuhkan beberapa pengujian dan analisis untuk mengetahui hubungan variabel, diantaranya adalah uji R square, uji t, uji F serta uji asumsi klasik yang mencakup uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi. Adapun definisi masing-masing pengujian :

3.3.1 Uji t

Uji t dilakukan untuk mengetahui signifikan atau tidak variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Uji ini dilakukan dengan membandingkan hasil dari t hitung dengan t tabel, dapat juga dilakukan dengan cara membandingkan probabilitas hasil regresi dengan derajat keyakinan. Menggunakan hipotesis sebagai berikut :

Variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen, jika t hitung lebih besar dari t tabel, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dan jika t hitung lebih kecil nilainya dari t tabel, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

Bila dengan membandingkan probabilitasnya pada derajat keyakinan 5%. Jika probabilitasnya kurang dari 5% atau 0,05 berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara signifikan. Dan berlaku juga sebaliknya, jika probabilitasnya lebih besar dari derajat keyakinan 5% atau 0,05 berarti variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

3.3.2 Uji F (Pengujian Secara Serempak)

Uji F dilakukan untuk mengetahui signifikan atau tidak variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara menyeluruh (bersama-sama). Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka menolak H_0 dan menerima H_a . Artinya secara bersama-sama variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen

secara signifikan. Dan sebaliknya, jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka menerima H_0 dan menolak H_a . Artinya variabel independen secara bersama – samatidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.

Bila dengan membandingkan probabilitasnya pada derajat keyakinan 5%. Jika probabilitasnya kurang dari 5% atau 0,05 berarti variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen secara signifikan. Dan berlaku juga sebaliknya, jika probabilitasnya lebih besar dari derajat keyakinan 5% atau 0,05 berarti variabel independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$, berarti tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. $H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$, berarti ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

3.3.3 Uji R^2 (Koefisien determinasi)

Pengujian R^2 ini berfungsi untuk menghitung seberapa baik garis regresi cocok dengan datanya atau mengukur presentase total variasi Y yang dijelaskan oleh garis regresi. Semakin angkanya mendekati 1 maka semakin baik garis regresi karena mampu menjelaskan data aktualnya. Semakin mendekati angka nol maka kita mempunyai garis regresi yang kurang baik. (Agus Widarjono, 2009).

3.3.4 Uji asumsi klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mendeteksi apakah model OLS menghasilkan estimator yang BLUE, sehingga tidak adagangguandalam OLS seperti pada masalah multikolinieritas, masalah heteroskedastisitas, dan masalah autokorelasi sehingga uji t dan uji F menjadi valid

3.3.4.1 Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah suatu kendala dimana terdapat hubungan antara variabel independen. Namun hasil estimasi tersebut masih menghasilkan estimator yang BLUE. Untuk memastikan ada atau tidaknya multikolinieritas dalam penelitian ini dapat dilakukan menggunakan uji Klien, yaitu dapat dilakukan dengan membandingkan nilai R^2 model utama dengan regresi parsial dari masing-masing variabel bebasnya. Jika dalam perbandingan tersebut nilai R^2 model utama dengan regresi parsial dari masing-masing variabel bebasnya. Jika dalam perbandingan tersebut nilai R^2 parsial dari masing-masing variabel independen lebih tinggi dari R^2 model utama, maka model tersebut mengandung unsur multikolinieritas antar variabel independen dan jika dalam perbandingan tersebut nilai R^2 parsial dari masing-masing variabel independen lebih rendah dari nilai R^2 model utama maka tidak ada korelasi antar variabel independen (Agus Widarjono, 2009 : 109)

3.3.4.2. Uji Heteroskedastisitas

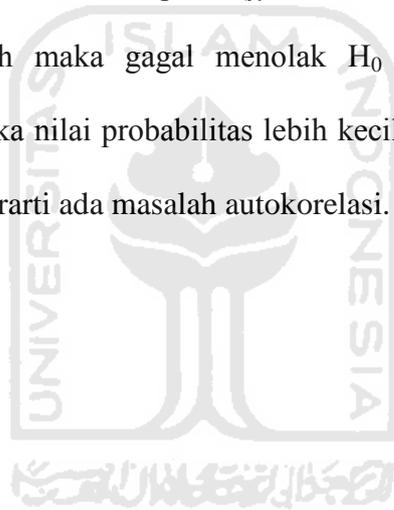
Heteroskedastisitas adalah suatu kendala yang ada pada varian dari variabel gangguan yang tidak konstan, sehingga estimator tidak lagi mempunyai varian yang minimum tetapi masih estimator yang linier dan tidak bias (BLUE). (Agus Widarjono, 2009 : 101). Untuk menguji ada tidaknya masalah heteroskedastisitas pada varian, dapat dilakukan dengan uji white langkahnya, yaitu Estimasi persamaan dan dapatkan residualnya. Setelah mendapatkan residualnya, regresi persamaan auxiliary dimana e_i^2 merupakan residual kuadrat yang diperoleh dari persamaan, setelah itu didapatkan nilai koefisien determinasi (R^2). Jika nilai chi-square hitung yaitu nR^2 lebih besar dari nilai χ^2 kritis dengan derajat kepercayaan tertentu (α) maka ada heteroskedastisitas dan sebaliknya jika chi-square lebih kecil dari nilai χ^2 kritis menunjukkan tidak adanya heteroskedastisitas.

3.3.4.3. Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan korelasi antara satu variabel gangguan dengan variabel gangguan lainnya. Sedangkan salah satu asumsi paling penting metode OLS berkaitan dengan variabel gangguan adalah tidak adanya hubungan antara variabel gangguan satu dengan variabel gangguan lainnya. (Agus Widarjono, 2009 : 137).

Untuk menguji ada tidaknya masalah heteroskedastisitas pada varian, dapat dilakukan dengan menggunakan metode Breusch-Godfrey atau yang lebih umum dikenal dengan uji *Lagrange Multiplier* (LM). Langkah yang harus dilakukan yaitu dengan mengestimasi persamaan dengan OLS dan didapatkan residualnya,

kemudian melakukan regresi residualnya dengan semua variabel independennya dan lag dari residualnya. Apabila nR^2 yang merupakan *chi-square* (χ^2) hitung lebih besar dari nilai kritis *chi-square* (χ^2) pada derajat kepercayaan tertentu, maka kita menolak H_0 . Hal ini berarti secara statistik signifikan tidak sama dengan nol. Ini menunjukkan adanya masalah autokorelasi dalam model. Sebaliknya jika *chi-square* (χ^2) lebih kecil dari nilai kritisnya maka gagal menolak H_0 . Artinya model tidak mengandung autokorelasi. Penentuan ada tidaknya masalah autokorelasi juga bisa dilihat dari nilai probabilitas *chi-square* (χ^2). Jika nilai probabilitas lebih besar dari nilai α yang dipilih maka gagal menolak H_0 yang berarti tidak ada autokorelasi. Sebaliknya jika nilai probabilitas lebih kecil dari nilai α yang dipilih maka menolak H_0 yang berarti ada masalah autokorelasi. (Agus Widarjono:144).



BAB IV

HASIL DAN ANALISIS

4.1 Deskripsi Data Penelitian

Semua data yang digunakan dalam analisis pada penelitian ini merupakan data sekunder, jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 6 tahun dalam kurun waktu 1999 - 2014. Penelitian ini dimaksudkan menganalisis pengaruh - pengaruh variabel independen dengan variabel dependen. Variabel-variabel tersebut adalah :

1. Variabel Y : Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung
2. Variabel X1 : Pengangguran Terbuka Provinsi Lampung
3. Variabel X2 : Realisasi Anggaran sektor Kesehatan Provinsi Lampung
4. Variabel X3 : Realisasi Anggaran sektor Pendidikan Provinsi Lampung
5. Variable X4 : Tingkat Kemiskinan Provinsi Lampung

Data Indeks pembangunan manusia provinsi lampung, Pengangguran Terbuka Provinsi Lampung, Tingkat Kemiskinan Provinsi Lampung diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung. Sedangkan data Realisasi Anggaran sektor Kesehatan Provinsi Lampung dan Realisasi Anggaran sektor Pendidikan Provinsi Lampung diperoleh dari Direktorat Jendral perimbangan

Keuangan (DJPK). Sebagaimana yang telah dipaparkan penulis akan menggunakan model Regresi Berganda. Alat olah dilakukan dengan Eviews6.0 pembahasan dilakukan dengan analisis secara ekonometrika.

4.2 Pemilihan Model Regresi

4.2.1 Uji MWD

Penelitian ini menggunakan model uji *Mc Kinnon, White dan Davidson* atau yang sering dikenal dengan uji MWD. Model uji MWD bertujuan untuk membandingkan antara model regresi dan model regresi *log* linier sehingga mendapatkan hasil regresi linier terbaik.

Untuk melakukan uji MWD ini kita asumsikan bahwa

H_0 : Y adalah fungsi linier dari variabel independen X (model linier)

H_1 : Y adalah fungsi *log* linier dari variabel independen X (model *log* linier)

Adapun prosedur metode MWD adalah sebagai berikut:

1. Estimasi model linier dan dapatkan nilai prediksinya (*fitted value*) dan selanjutnya dinamai F1.
2. Estimasi model *log* linier dan dapatkan nilai prediksinya, dan selanjutnya dinamai F2.
3. Dapatkan nilai $Z1 = \ln F1-F2$ dan $Z2 = \text{antilog } F2-F1$

4. Estimasi persamaan berikut ini:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 Z_1 + e_i$$

Jika Z_1 signifikan secara statistik melalui uji t maka kita menolak hipotesis dan model yang tepat untuk digunakan adalah model *log* linier dan sebaliknya jika tidak signifikan maka kita menerima hipotesis nul dan model yang tepat digunakan adalah model linier.

5. Estimasi persamaan berikut:

$$\ln Y_i = \beta_0 + \beta_1 \ln X_1 + \beta_2 \ln X_2 + \beta_3 \ln X_3 + \beta_4 Z_2 + e_i$$

Jika Z_2 signifikan secara statistik melalui uji t maka kita menolak hipotesis alternatif dan model yang tepat untuk digunakan adalah model linier dan sebaliknya jika tidak signifikan maka kita menerima hipotesis alternatif dan model yang tepat untuk digunakan adalah model *log* linier.

Hasil uji dapat dilihat dengan cara membandingkan antara Z_1 dan Z_2 dengan α . Berikut Hasil dari uji MWD yang dilakukan penulis menggunakan *Eviews*:

Tabel 4. 1

Hasil Estimasi Uji MWD untuk Model Linier

➤ Hasil MWD model linier

Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Date: 10/31/16 Time: 21:26

Sample: 1999 2014

Included observations: 16

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3272.185	1296.657	-2.523555	0.0302
X1	3.775926	1.616832	2.335386	0.0417
X2	-1.65E-10	7.01E-11	-2.357506	0.0401
X3	-2.98E-11	1.35E-11	-2.201256	0.0523
X4	3.825709	1.613886	2.370496	0.0392
Z1	786.1971	304.6319	2.580810	0.0274
R-squared	0.963361	Mean dependent var		68.98438
Adjusted R-squared	0.945041	S.D. dependent var		3.320869
S.E. of regression	0.778521	Akaike info criterion		2.617155
Sum squared resid	6.060952	Schwarz criterion		2.906876
Log likelihood	-14.93724	Hannan-Quinn criter.		2.631991
F-statistic	52.58634	Durbin-Watson stat		1.947563
Prob(F-statistic)	0.000001			

Berdasarkan hasil uji MWD menyatakan Z1 signifikan secara statistic melalui uji t maka kita menolak hipotesis dan model yang tepat untuk di gunakan adalah model log linier.

Tabel 4. 2**Hasil Estimasi Uji MWD untuk Model *Log Linier***

Dependent Variable: LOG(Y)

Method: Least Squares

Date: 10/31/16 Time: 21:27

Sample: 1999 2014

Included observations: 16

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.308010	0.287619	11.50138	0.0000
LOG(X1)	-0.003107	0.034430	-0.090233	0.9299
LOG(X2)	0.024756	0.005832	4.245093	0.0017
LOG(X3)	0.013323	0.007998	1.665721	0.1267
LOG(X4)	-0.007827	0.017837	-0.438835	0.6701
Z2	-0.003174	0.004926	-0.644288	0.5339
R-squared	0.973901	Mean dependent var		4.232778
Adjusted R-squared	0.960852	S.D. dependent var		0.048655
S.E. of regression	0.009672	Akaike info criterion		-6.168519
Sum squared resid	0.000972	Schwarz criterion		-5.878799
Log likelihood	55.34815	Hannan-Quinn criter.		-6.153683
F-statistic	74.63206	Durbin-Watson stat		1.573294
Prob(F-statistic)	0.000000			

Berdasarkan Uji MWD Z_2 menyatakan Z_2 signifikan secara statistic melalui uji t maka kita menolak hipotesis alternatif dan model yang tepat untuk digunakan adalah model linier dan sebaliknya jika tidak signifikan maka kita menerima hipotesis alternatif dan model yang tepat untuk digunakan adalah model log linier.

Berdasarkan hasil Z_1 dan Z_2 tersebut, dapat disimpulkan bahwa model linier lebih baik dibandingkan *log* linier. Sehingga model linier digunakan dalam penelitian ini.

4.3.1 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas adalah uji untuk masalah pada varian dari variabel gangguan yang tidak dapat konstan atau stagnan. Dari uji heterokedastisitas akan menghasilkan estimator masih linier dan bias (LUE), dapat dilihat pada tabel berikut :

b. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey			
F-statistic	1.348647	Prob. F(4,11)	0.3130
Obs*R-squared	5.264749	Prob. Chi-Square(4)	0.2612
Scaled explained SS	1.322657	Prob. Chi-Square(4)	0.8575

Pada hasil diatas bahwa nilai dari probabilita sebesar 0.8575 yang mana nilai tersebut lebih besar dari pada $\alpha = 5\%$ yang berarti dapat dilihat bahwa nilai prob-chi-square tidak signifikan berarti tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

4.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah adanya hubungan linear yang sempurna dengan semua variabel sebagai penjelas model regresi. Dapat diukur dengan cara koefisien korelasi antara masing-masing variabel bebas lebih besar dari 0,85 berarti terdapat multikolinearitas dalam model regresi.

Tabel 4.3

Hasil Uji Multikolinieritas dengan Uji Korelasi

Variance Inflation Factors

Date: 08/20/16 Time: 18:02

Sample: 1999 2014

Included observations: 16

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	10.94717	190.9007	NA
X1	0.154167	154.9776	7.212566
LOG(X2)	2.50E-23	11.54392	4.731273
LOG(X3)	3.16E-23	17.09114	7.900439
X4	0.007603	33.81834	1.522615

Nilai Centered VIF dibawah 10 maka tidak terjadi multikolinieritas

4.3.3 Uji autokorelasi

Autokolerasi adalah kolerasi antara satu variabel gangguan dengan variabel gangguan yang lain. Sedangkan asumsi penting metode OLS berkaitan dengan variabel gangguan adalah tidak adanya hubungan antara variabel gangguan satu dengan variabel gangguan lainnya. (Agus Widarjono, 2009)

Untuk menguji ada tidaknya autokolerasi, peneliti menggunakan uji LM yang dicetuskan oleh Breusch-Godfrey yaitu dengan membandingkan chi square hitung dengan chi square tabel. Jika chi square hitung lebih besar daripada nilai

chi square tabel $\alpha = 5\%$, maka menolak H_0 berarti terdapat masalah autokorelasi sebaliknya.

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.603747	Prob. F(2,9)	0.5675
Obs*R-squared	1.892718	Prob. Chi-Square(2)	0.3882

Berdasarkan hasil uji metode LM diatas memberikan beberapa informasi bahwa nilai probabilitas chi square sebesar 0.3882 lebih besar dari $\alpha = 5\%$. Jika nilai probabilitas chi square lebih besar dari α maka gagal menolak H_0 yang berarti tidak ada autokorelasi (Agus Widarjono,2009). Sehingga dapat disimpulkan model regresi tidak terdapat masalah autokorelasi.

4.3.4 Koefisien Determinasi R-squared (R^2)

Uji R-squared bertujuan mengukur persentase total variasi Y yang telah dijabarkan. Semakin angkanya mendekati 1 semakin baik dikarenakan menjelaskan bahwa data aktualnya begitupun sebaliknya.

Hasil estimasi sebesar 0.969810, artinya bahwa **96 %** variasi variabel dependen “Indeks Pembangunan Manusia Provisi lampung” menjelaskan oleh beberapa variabel independen “penggaguran terbuka, realisasi anggaran sektor kesehatan, realisasi anggaran sektor pendidikan,kemiskinan di provinsi lampung” , sedangkan sisanya sebesar **0,1%** dijelaskan oleh variabel lain pada luar model.

4.4 Uji Statistik

4.4.1 Uji F Statistik

Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independent secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Jika $F_{hitung} < F_{kritis}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Maka variabel independent tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Sebaliknya, Jika $F_{hitung} > F_{kritis}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Maka disimpulkan variabel independent berpengaruh terhadap variabel dependen secara signifikan.

R-squared	0.969810
Adjusted R-squared	0.958832
F-statistic	88.33921
Prob(F-statistic)	0.000000

Fhitung (F-statistik) dalam perhitungan menggunakan E-views 9 sebesar 88.33921 dan probabilitasnya sebesar 0.000000 ($< \alpha 5\%$), sehingga dapat disimpulkan bahwa secara estimasi regresi berganda, variabel independen bersama-sama signifikan mempengaruhi variabel dependen

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = \beta_6 = \beta_7 = \beta_8 = 0$$

H_a : paling tidak terdapat satu β tidak sama dengan nol

Besarnya F kritis pada $\alpha = 5\%$

df numerator (k-1) = 5

df denominator (n-k) = 27

F kritis = 2,57

Hasil estimasi F hitung sebesar 88.33921 dan nilai F kritis dengan $\alpha = 5\%$ adalah **2,57** karena F hitung lebih besar dari F kritis maka **menolak H_0** artinya variabel independen **berpengaruh signifikan** terhadap variabel dependen.

4.4.1 Uji T Statistik

Tabel 4.4 Uji T

Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Date: 11/01/16 Time: 01:30

Sample: 1999 2014

Included observations: 16

	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	74.23251	3.307199	22.44574	0.0000
X1	-0.314905	0.392309	-0.802697	0.4391
X2	1.53E-11	5.00E-12	3.072046	0.0106
X3	3.10E-12	5.61E-12	0.553418	0.5910
X4	-0.335406	0.087204	-3.846214	0.0027
R-squared	0.938957	Mean dependent var	68.98438	
Adjusted R-squared	0.916759	S.D. dependent var	3.320869	
S.E. of regression	0.958118	Akaike info criterion	3.002616	
Sum squared resid	10.09790	Schwarz criterion	3.244050	
Log likelihood	-19.09790	Hannan-Quinn criter.	3.014979	
F-statistic	42.30018	Durbin-Watson stat	1.243442	
Prob(F-statistic)	0.000001			

Uji Statistik t adalah uji yang bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Dengan

cara menguji masing-masing variabel independen dengan variabel dependen. Uji ini dilakukan dengan cara membandingkan hasil uji t hitung dan t tabel.

Untuk hasil akhir membandingkan probabilitas $\alpha = 1\%$, 5% dan 10% . Maka probabilitas $< 1\%$, 5% dan 10% , variabel independent secara individu mampu mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Sebaliknya, apabila probabilitas $> 1\%$, 5% dan 10% , artinya variabel independent secara individu tidak berpengaruh variabel dependen secara signifikan.

Hipotesis yang mepaparkan pengujian ini adalah :

Hipotesis Satu Sisi Negatif

$H_0 : \beta \geq 0$ (Tidak Berpengaruh)

$H_a : \beta < 0$ (Berpengaruh)

Hipotesis Satu Sisi Positif

$H_0 : \beta \leq 0$ (tidak berpengaruh)

$H_a : \beta > 0$ (berpengaruh)

$N-k : 16-5 = 11$

a. Uji T terhadap Pengangguran di Lampung

Berdasarkan nilai uji T dengan derajat kebebasan 11 dan alfa = 10%, maka dapat di peroleh nilai T table sebesar 1.363. Sedangkan , untuk nilai T hitung sebesar -0,802697.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat di ketahui t hitung > t kritis, sehingga H_0 di tolak dan H_a di terima. Koefisien variabel dari pengangguran adalah sebesar -0.314905 sedangkan probabilitas sebesar 0.4291(>10%). Secara statistic dalam taraf signifikansi 10% maka variabel pengangguran secara individu negative tidak signifikan terhadap IPM, Secara statistic menunjukkan apabila pengangguran naik 1% maka IPM akan turun 0.314905%.

b. Uji T Terhadap Realisasi Anggaran Kesehatan di Lampung

Berdasarkan nilai uji T dengan derajat kebebasan 11 dan alfa = 10%, maka dapat di peroleh nilai T table sebesar 1.363. Sedangkan , untuk nilai T hitung sebesar 3.072046

Berdasarkan hasil tersebut, dapat di ketahui t hitung < t kritis, sehingga H_0 di tolak dan H_a di tolak. Koefisien variabel dari kesehtan adalah sebesar 1.53E-11 sedangkan probabilitas sebesar 0.0106(<10%). Secara statistic dalam taraf signifikansi 10% maka variabel kesehatan kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, Secara statistic menunjukkan apabila kesehatan naik 1% maka IPM akan naik 0.314905%.

C. Uji t terhadap Realisasi Anggaran Pendidikan di Lampung

Berdasarkan nilai uji T dengan derajat kebebasan 11 dan alfa = 10%, maka dapat di peroleh nilai T table sebesar 1.363. Sedangkan , untuk nilai T hitung sebesar 0.553418.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat di ketahui t hitung < t kritis, sehingga H_0 di tolak dan H_a di tolak. Koefisien variabel dari kesehatan adalah sebesar $1.53E-11$ sedangkan probabilitas sebesar $0.5910(<10\%)$. Secara statistic dalam taraf signifikansi 10% maka variabel pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, Secara statistic menunjukkan apabila pendidikan naik 1% maka IPM akan naik 3.10%.

a. Uji T Terhadap Kemiskinan di Lampung

Berdasarkan nilai uji T dengan derajat kebebasan 11 dan alfa = 10%, maka dapat di peroleh nilai T table sebesar 1.363. Sedangkan , untuk nilai T hitung sebesar -3.846214.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat di ketahui t hitung < t kritis, sehingga H_0 di tolak dan H_a di tolak. Koefisien variabel dari kesehatan adalah sebesar $1.53E-11$ sedangkan probabilitas sebesar $0.0027(>10\%)$. Secara statistic dalam taraf signifikansi 10% maka variabel kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, Secara statistic menunjukkan apabila pendidikan naik 1% maka IPM akan turun 0.335406%.

4.5 Interpretasi Data dan Analisis Ekonomi

4.5.1 Interpretasi Hasil

a. Pengaruh tingkat Pengangguran terbuka Provinsi Lampung Terhadap Indeks pembangunan manusia Provinsi Lampung

Hasil regresi berganda menunjukkan variable Pengangguran terbuka Provinsi Lampung tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia provinsi Lampung dengan koefisien sebesar -0.314905 Kemudian probabilitasnya sebesar 0.4391, maka dapat di simpulkan variable Pengangguran terbuka tidak signifikan pada $\alpha = 10\%$.

b. Pengaruh Realisasi Anggaran sektor Kesehatan Provinsi Lampung Terhadap indeks pembangunan manusia Provinsi Lampung

Hasil regresi berganda menunjukkan variable Realisasi Anggaran sektor Kesehatan Provinsi Lampung Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung dengan koefisien sebesar 1.53E-11 Kemudian probabilitasnya sebesar 0.0106 , maka dapat di simpulkan variable signifikan pada $\alpha = 10\%$. Artinya tingkat Realisasi Anggaran sektor Kesehatan Provinsi Lampung mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung. Artinya ketika Realisasi Anggaran sektor Kesehatan Provinsi Lampung meningkat 1% maka Indeks pembangunan Manusia Provinsi Lampung meningkat 1.53 %.

c. Pengaruh Realisasi Anggaran sektor Pendidikan Provinsi Lampung Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung

Hasil regresi berganda menunjukkan variable Realisasi Anggaran sektor Pendidikan Provinsi Lampung berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung dengan koefisien sebesar $3.10E-12$. Kemudian probabilitasnya sebesar 0.5910, maka dapat di simpulkan variable signifikan pada $\alpha = 10\%$.

d. Pengaruh tingkat kemiskinan Provinsi Lampung Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung

Hasil regresi berganda menunjukkan variable tingkat kemiskinan Provinsi Lampung tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung dengan koefisien sebesar -0.335406. Kemudian probabilitasnya sebesar 0.0027 (.10%), maka dapat di simpulkan variable signifikan pada $\alpha = 10\%$. Artinya, tingkat kemiskinan Provinsi Lampung tidak mempunyai pengaruh terhadap Indeks pembangunan Manusia Provinsi Lampung, Secara statistic menunjukkan apabila kemiskinan naik 1% maka IPM akan turun 0.335406%.

4.5.1 Analisis Ekonomi

Berdasarkan hasil analisis diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan hipotesis, pengaruh variabel Pengangguran Terbuka di Provinsi Lampung tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan

Manusia Provinsi Lampung, Penelitian ini menyatakan bahwa pengaruh yang terdapat pada Pengangguran Terbuka di Provinsi Lampung adalah signifikan negatif dan tidak berpengaruh. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang berlaku. Menurut pandangan Teori Todaro (2000) juga mengatakan bahwa pembangunan manusia merupakan tujuan pembangunan itu sendiri. Yang mana pembangunan manusia memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern untuk mengembangkan kapasitasnya agar tercipta kesempatan kerja untuk mengurangi jumlah pengangguran untuk melakukan pembangunan manusia yang berkelanjutan. Dengan teratasinya jumlah pengangguran dan mendapatkan pendapatan yang tinggi maka akan berpengaruh terhadap peningkatan pembangunan manusia melalui peningkatan bagian pengeluaran rumah tangga yang dibelanjakan untuk makanan yang lebih bergizi dan pendidikan yang lebih tinggi. Sehingga pengurangan pengangguran dapat kita lihat dari jumlah indeks pembangunan manusia yang mengalami peningkatan.

2. Berdasarkan hipotesis, pengaruh variabel Realisasi Anggaran sektor Kesehatan Provinsi Lampung adalah Signifikan positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan teori yang berlaku. Teori Rostow dan Musgrave adalah pandangan yang timbul dari pengamatan atas pengalaman pembangunan ekonomi yang dialami banyak negara tetapi tidak didasari oleh suatu teori tertentu. Selain tidak jelas apakah tahap pertumbuhan

ekonomi terjadi dalam tahap demi tahap atau beberapa tahap dapat terjadi secara simultan. Pendidikan dan kesehatan yang baik akan meningkatkan kapasitas dan kemerdekaan hidup yang dinamakan manfaat intrinsik. Pendidikan dan kesehatan berperan membuka peluang yang lebih besar untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi yang dinamakan manfaat instrumental (Lanjouw, dkk 2001:112). Pendidikan dan kesehatan penduduk sangat menentukan kemampuan untuk menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baik dalam kaitannya dengan teknologi sampai kelembagaan yang penting bagi pertumbuhan ekonomi.

3. Berdasarkan hipotesis, pengaruh variabel Realisasi anggaran sektor pendidikan provinsi Lampung adalah Signifikan positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung. Penelitian ini menyatakan bahwa pengaruh yang terdapat pada PDRB adalah signifikan signifikan dan positif. Hal ini menunjukkan kesesuaiamn dengan teori yang berlaku.. Menurut pandangan Meier dan Rauch dikatakan pendidikan, atau lebih luas lagi adalah modal manusia, dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan. Hal ini karena pendidikan pada dasarnya adalah bentuk dari tabungan, menyebabkan akumulasi modal manusia dan pertumbuhan output agregat jika modal manusia merupakan input dalam fungsi produksi agregat.
4. Berdasarkan hipotesis, pengaruh variable Kemiskinan Provinsi Lampung tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi

Lampung. Penelitian ini menyatakan bahwa pengaruh yang terdapat pada Kemiskinan Provinsi Lampung adalah signifikan negatif. Hal ini menunjukkan sesuai dengan teori yang berlaku. Menurut Yani Mulyaningsih (2008) bahwa indeks pembangunan manusia memuat tiga dimensi penting dalam pembangunan yaitu terkait dengan aspek pemenuhan kebutuhan akan hidup panjang umur (Longevity) dan hidup sehat (healthy life), untuk mendapatkan pengetahuan (the knowledge) dan mempunyai akses kepada sumberdaya yang bisa memenuhi standar hidup. Artinya, kemiskinan sangat berpengaruh terhadap tiga dimensi penting dalam pembangunan manusia tersebut.



BAB V

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain sebagai berikut :

a. Hasil Analisis mengenai pengaruh Pengangguran Terbuka terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung menunjukkan tidak berpengaruh signifikan karena selamadasawarsa terakhir, ekonomi lampung bergerak berpindah menjadi perekonomian yang lebih berorientasi kepada jasa dan modal-intensif seperti keuangan, telekomunikasi, pertambangan–yang notabene menyerap tenaga kerja lebih sedikit karena memerlukan tenaga kerja terampil. Hal ini kemudian menyingkirkan kurang berpendidikan dan kurang memenuhi tuntutan lapangan kerja dari berkah pembangunan ekonomi manusia lampung yang meningkat setiap tahunnya.

b. Hasil analisi mengenai Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung. Hal ini berarti bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung.

Apabila kualitas pendidikan lebih baik maka kualitas SDM akan meningkat, sehingga masyarakat dapat menikmati hidup yang lebih layak.

c. Hasil analisi mengenai Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung. Hal ini berarti bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung. Apabila kualitas kesehatan lebih baik maka kualitas SDM akan meningkat, sehingga masyarakat dapat menikmati hidup yang lebih layak.

d. Pada penelitian ini ditemukan bahwa peningkatan Kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, hal tersebut disebabkan tidak meratanya hasil pembangunan, oleh karena itu diharapkan pemerintah tidak hanya terfokus pada pertumbuhan ekonomi lampung saja, tetapi pemerataannya juga harus lebih diperhatikan dengan kebijakan yang difokuskan pada sektor riil seperti pertanian. daerah Lampung merupakan daerah yang strategis dan merupakan menjadi basis pertanian. Namun sangat disayangkan ketika penambahan infrastruktur yang dilakukan pemerintah justru tetap tidak bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dana desa sendiri yang diharapkan jadi penolong tidak bisa digunakan secara maksimal karena minimnya sosialisasi dan pemahaman pengelolaan dana.

5.2.Implikasi dan Saran:

a. Pemerintah sangat tidak serius dalam membangun sektor-sektor unggulan provinsi lampung yang bisa meningkatkan pembangunan manusia di lampung karena alokasi anggaran untuk membangun sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan laut dan darat, serta untuk membangun infrastruktur pertanian, pedesaan, dan perikanan masih relatif terlalu kecil.

b. Melihat besarnya pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung, maka diharapkan pemerintah Provinsi Lampung dapat meningkatkan realisasi pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan. Pemerintah Provinsi Lampung harus mengalokasikan 20% dari total APBD untuk sektor pendidikan sesuai dengan UU No. 20 tahun 2003 Pasal 49 tentang pendidikan. Peningkatan pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dapat dilakukan melalui beberapa hal, antara lain dengan memberikan bantuan- bantuan pendidikan berupa beasiswa, perbaikan gedung-gedung sekolah yang kurang layak, dan menambah fasilitas-fasilitas pendidikan seperti buku-buku bacaan di setiap institusi pendidikan yang ada di Provinsi lampung.

c. Melihat besarnya pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung, maka diharapkan pemerintah Provinsi Lampung dapat meningkatkan

realisasi pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan. Pemerintah Provinsi Lampung harus mengalokasikan 10% dari total APBD untuk sektor kesehatan sesuai dengan UU No. 36 tahun 2009 Pasal 171 tentang kesehatan. Peningkatan pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan dapat dilakukan melalui beberapa hal, diantaranya dengan menyediakan fasilitas-fasilitas kesehatan yang memadai, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, melakukan penyuluhan-penyuluhan kesehatan, serta mengadakan pengobatan-pengobatan gratis bagi masyarakat miskin.

d. Dewasa ini produktivitas sektor industri dan sektor jasa sudah lebih dari tujuh kali lipat dan tiga kali lipat daripada sektor pertanian. Sementara itu nilai tukar petani juga terus menurun. Kombinasi dari kedua kondisi ini membuat tingkat kesejahteraan mereka yang bekerja di sektor pertanian tertinggal semakin jauh dalam sirkuit balap antarsektor. Dengan kata lain mereka menjadi semakin miskin. Di tambah jumlah kredit yang dialokasikan oleh perbankan ke sektor industri dan jasa jauh lebih besar daripada ke sektor pertanian. Sudah seharusnya pemerintah menfokuskan alokasi dana pemerintahan yang besar untuk pertanian untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan daya saing keluarga petani di Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

Arif, Hubban. 2013. Analisis Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sumatera Barat. Jurnal Ekonomi Pembangunan. FE Universitas Bung Hatta.

Basri, F. 2002. Perekonomian Indonesia : Tantangan dan Harapan bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia. Erlangga. Jakarta.

BPS. 2000-2015. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung, beberapa terbitan. BPS Provinsi Lampung. Lampung.

BPS. 2000-2015. Lampung Dalam Angka, beberapa terbitan.

Putra, Adi Dwi. 2015. Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung. FEB Universitas Lampung.

Rahayuningsih, Ida, dkk. 2009. Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan Dampaknya Pada Peningkatan Pendidikan, Kesehatan, Dan Ekonomi Di Kabupaten Gresik. Jurnal Logos Vol. 6, No. 2, Hal. 256 – 274.

Sugiharto, Slamet. 2007. Komitmen Pembangunan Manusia. Ilmiah Widyaiswara Indonesia dan Balai Diklat Keuangan III Yogyakarta, Yogyakarta.

Suminto. 2004. Pengelolaan APBN Dalam Sistem Manajemen Keuangan Negara. Makalah sebagai bahan penyusunan Budget in Brief 2004 (Ditjen Anggaran Departemen Keuangan). Jakarta.

Todaro, Michael P & Smith, Stephen C. 2006. Pembangunan Ekonomi. Edisi Kesembilan. Jakarta : Penerbit Erlangga.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Anggaran Pendidikan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Anggaran Kesehatan.

Usmaliadanti, Christina. 2011. Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah Sekor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2009. FE Universitas Diponegoro. Semarang.

LAMPIRAN – LAMPIRAN



Tabel 4. 1

Hasil Estimasi Uji MWD untuk Model Linier

➤ Hasil MWD model linier

Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Date: 10/31/16 Time: 21:26

Sample: 1999 2014

Included observations: 16

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3272.185	1296.657	-2.523555	0.0302
X1	3.775926	1.616832	2.335386	0.0417
X2	-1.65E-10	7.01E-11	-2.357506	0.0401
X3	-2.98E-11	1.35E-11	-2.201256	0.0523
X4	3.825709	1.613886	2.370496	0.0392
Z1	786.1971	304.6319	2.580810	0.0274
R-squared	0.963361	Mean dependent var		68.98438
Adjusted R-squared	0.945041	S.D. dependent var		3.320869
S.E. of regression	0.778521	Akaike info criterion		2.617155
Sum squared resid	6.060952	Schwarz criterion		2.906876
Log likelihood	-14.93724	Hannan-Quinn criter.		2.631991
F-statistic	52.58634	Durbin-Watson stat		1.947563
Prob(F-statistic)	0.000001			

Tabel 4. 2**Hasil Estimasi Uji MWD untuk Model *Log* Linier**

Dependent Variable: LOG(Y)

Method: Least Squares

Date: 10/31/16 Time: 21:27

Sample: 1999 2014

Included observations: 16

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.308010	0.287619	11.50138	0.0000
LOG(X1)	-0.003107	0.034430	-0.090233	0.9299
LOG(X2)	0.024756	0.005832	4.245093	0.0017
LOG(X3)	0.013323	0.007998	1.665721	0.1267
LOG(X4)	-0.007827	0.017837	-0.438835	0.6701
Z2	-0.003174	0.004926	-0.644288	0.5339
R-squared	0.973901	Mean dependent var		4.232778
Adjusted R-squared	0.960852	S.D. dependent var		0.048655
S.E. of regression	0.009672	Akaike info criterion		-6.168519
Sum squared resid	0.000972	Schwarz criterion		-5.878799
Log likelihood	55.34815	Hannan-Quinn criter.		-6.153683
F-statistic	74.63206	Durbin-Watson stat		1.573294
Prob(F-statistic)	0.000000			

4.5.2

Tabel 4.4 Uji T

Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Date: 11/01/16 Time: 01:30

Sample: 1999 2014

Included observations: 16

	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	74.23251	3.307199	22.44574	0.0000
X1	-0.314905	0.392309	-0.802697	0.4391
X2	1.53E-11	5.00E-12	3.072046	0.0106
X3	3.10E-12	5.61E-12	0.553418	0.5910
X4	-0.335406	0.087204	-3.846214	0.0027
R-squared	0.938957	Mean dependent var		68.98438
Adjusted R-squared	0.916759	S.D. dependent var		3.320869
S.E. of regression	0.958118	Akaike info criterion		3.002616
Sum squared resid	10.09790	Schwarz criterion		3.244050
Log likelihood	-19.09790	Hannan-Quinn criter.		3.014979
F-statistic	42.30018	Durbin-Watson stat		1.243442
Prob(F-statistic)	0.000001			

Tahun	Y	X1	X2	x3
1999	63	10.4	6,007,565,496	6,561,035,740
2000	64.1	8.37	15,199,563,000	8,398,215,000
2001	64.9	9.3	17,076,520,000	11,194,840,000
2002	65.8	9.31	32,899,610,000	26,155,710,000
2003	66	7.9	34,106,000,000	28,869,000,000
2004	68.4	7.38	78,866,549,375	71,566,353,329
2005	68.85	8.47	87,435,499,624	33,004,636,049
2006	69.38	9.13	106,173,200,065	38,622,654,461
2007	69.78	7.58	54,296,263,007	86,285,614,336
2008	70.3	7.15	160,866,569,603	75,431,164,716
2009	70.93	6.62	180,000,000,000	268,196,397,636
2010	71.42	5.57	119,332,118,836	236,025,869,519
2011	71.94	5.78	190,243,253,433	296,885,831,608
2012	72.45	5.18	260,975,962,752	284,422,915,478
2013	72.87	5.69	323,047,278,382	300,193,983,238
2014	73.63	4.79	334,893,405,336	295,664,882,843

y	IPM
x1	Pengangguran
x2	Kesehatan
x3	Pendidikan
x4	kemiskinan

x4
23.43
19.14
18.41
18.2
17.42
16.66
15.97
13.47
12.52
11.65
10.72
9.87
16.93
16.18
14.86
14.28